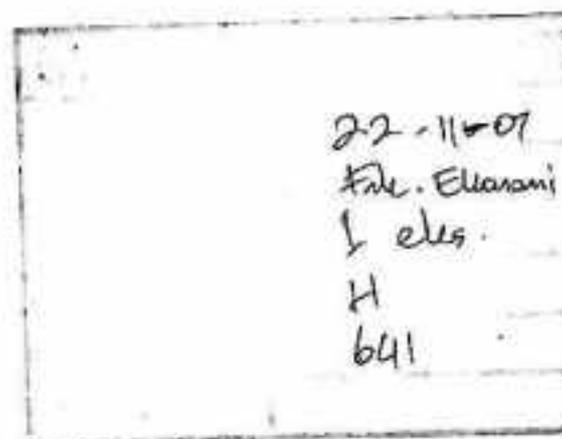


**PENGARUH PINJAMAN MODAL USAHA DAN
PEMBINAAN USAHA TERHADAP PERKEMBANGAN
USAHA KECIL MELALUI PROGRAM KEMITRAAN PADA
PT. JASA RAHARJA (PERSERO) MAKASSAR**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh :

**KEMAL KARMAN KAMALUDDIN
A 211 03 894**

Kepada

**JURUSAN MANAJEMEN PEMASARAN
PROGRAM REGULER SORE, FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2007**



**PENGARUH PINJAMAN MODAL USAHA DAN PEMBINAAN
USAHA TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA KECIL
MELALUI PROGRAM KEMITRAAN PADA
PT. JASA RAHARJA (PERSERO) MAKASSAR**

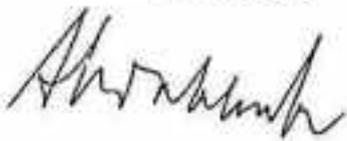
Diajukan Oleh :

**KEMAL KARMAN KAMALUDDIN
A 211 03 894**

Telah disetujui Oleh:

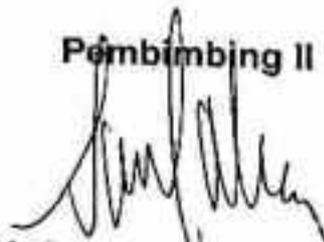
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. A. Rahman Laba, SE, MBA

Pembimbing II



Dr. H. Syamsu Alam, SE, MSi

**PENGARUH PINJAMAN MODAL USAHA DAN PEMBINAAN
USAHA TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA KECIL
MELALUI PROGRAM KEMITRAAN PADA PT. JASA
RAHARJA (PERSERO) MAKASSAR**

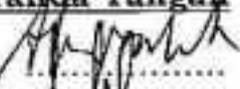
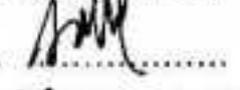
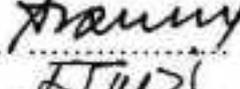
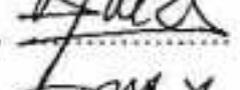
Oleh:

KEMAL KARMAN KAMALUDDIN

NIM. A21103894

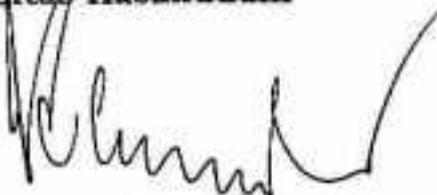
Telah Diuji dan Lulus Tanggal 10 AGUSTUS 2007

TIM PENGUJI

| <u>Nama Penguji</u> | <u>Jabatan</u> | <u>Tanda Tangan</u> |
|-------------------------------------|----------------|--|
| 1. Dr. A. Rahman Laba, SE.,MBA | Ketua | 1.  |
| 2. Dr. H. Syamsu Alam, SE.,M.Si | Sekretaris | 2.  |
| 3. Prof.Dr. Nurdin Brasit, SE.,M.Si | Anggota | 3.  |
| 4. Dr. Sumardi, SE.,M.Si | Anggota | 4.  |
| 5. Musran Munizu, SE.,M.Si | Anggota | 5.  |

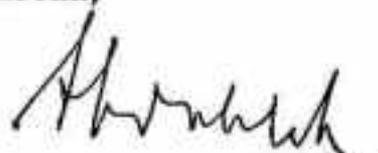
Disetujui oleh:

Program Reguler Sore
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Ketua,



Drs. H. Anwar Guricci, DESS

Tim Penguji
Jurusan MANAJEMEN
Fakultas Ekonomi UNHAS
Ketua,



Dr. A. Rahman Laba, SE.,MBA

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul "Pengaruh Pinjaman Modal Usaha dan Pembinaan Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Melalui Program Kemitraan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Makassar" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Reguler Sore, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. A. Rahman Laba, SE.,MBA sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. H. Syamsul Alam, SE.,M Si sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam mengarahkan penulis hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Ketua Program Reguler Sore, serta seluruh Dosen dan karyawan Program Reguler Sore, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin atas segala bimbingan, bantuan dan fasilitas selama masa studi.
3. Bapak Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan dan Bapak Penanggung Jawab Program Kemitraan beserta

karyawan yang telah bersedia memberikan informasi dan fasilitas selama penulis melakukan penelitian.

4. Sembah sujud kepada kedua orangtuaku, kepada ayahanda Karman Kamaluddin, SE dan ibunda Ir. Nurliani, MSi, MPd, juga pada adik-adikku Kartika dan Karina atas segala doa, pengorbanan, pengertian dan kasih sayang yang tulus.
5. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Program Reguler Sore, khususnya Angkatan 2003 dan 2004 yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.....

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin

Makassar, Agustus 2007

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan | 6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II. LANDASAN TEORI, KERANGKA PIKIR, HIPOTESIS | |
| 2.1. Landasan Teori | 8 |
| 2.1.1. Pengertian Usaha Kecil | 8 |
| 2.1.2. Perkembangan Usaha Kecil | 10 |
| 2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha | 13 |
| 2.1.4. Pengertian Kemitraan | 18 |
| 2.2. Kerangka Pikir | 24 |
| 2.3. Hipotesis | 26 |
| BAB III. METODOLOGI PENELITIAN | |
| 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian | 27 |
| 3.2. Populasi dan Sampel | 27 |
| 3.3. Metode Pengumpulan Data | 27 |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data | 28 |
| 3.5. Metode Analisis | 29 |
| 3.6. Definisi Operasional | 31 |

| | |
|--|----|
| BAB IV. GAMBARAN UMUM PT. JASA RAHARJA (PERSERO) | |
| 4.1. Sejarah Singkat Perusahaan | 33 |
| 4.2. Peran BUMN PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan | 36 |
| 4.3. Struktur Organisasi Program Kemitraan..... | 41 |
| BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 5.1. Identitas Responden | 46 |
| 5.2. Mekanisme Penyaluran dan Pengembalian Dana Program Kemitraan | 51 |
| 5.3. Pinjaman Modal dan Pembinaan Usaha | 60 |
| 5.4. Pemanfaatan dan Pengembalian Pinjaman Modal Usaha | 66 |
| 5.5. Perkembangan Usaha Mitra Binaan | 71 |
| 5.6. Analisis Pengaruh Pinjaman Modal Usaha dan Pembinaan Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mitra Binaan | 72 |
| BAB VI. PENUTUP | |
| 6.1. Kesimpulan | 77 |
| 6.2. Saran | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1. | Perkerbangan Realisasi Penyaluran dan Jumlah Mitra Binaan BUMN PT. Jasa Raharja (Persero) Tahun 2001-2006 | 4 |
| Tabel 2. | Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), 2007 | 47 |
| Tabel 3. | Sebaran Responden Menurut Tingkat Pendidikan Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), 2007 | 48 |
| Tabel 4. | Sebaran Responden Menurut Pengalaman Ber Usaha Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), 2007 | 49 |
| Tabel 5. | Sebaran Responden Menurut Jenis Kegiatan Usaha Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), 2007 | 51 |
| Tabel 6. | Penyaluran Pinjaman Modal Usaha Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), 2007 | 61 |
| Tabel 7. | Pinjaman Modal Usaha yang Diterima oleh Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), 2007 | 62 |
| Tabel 8. | Tingkat Bunga Pinjaman Program Kemitraan oleh Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), 2007 | 63 |
| Tabel 9. | Frekuensi dan Biaya Pendidikan/Pelatihan yang Diikuti oleh Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), 2007 | 65 |
| Tabel 10. | Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), 2007..... | 67 |
| Tabel 11. | Tingkat Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha oleh Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), 2007 | 68 |

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 12. | Tingkat Pengembalian Pinjaman Modal Usaha Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), 2007 | 69 |
| Tabel 13. | Proses Pengembalian Pinjaman Modal Usaha Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), 2007 | 70 |
| Tabel 14. | Peningkatan Omset Penjualan Usaha Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), 2007 | 71 |
| Tabel 15. | Hasil Analisis Regresi Berganda Pengaruh Pinjaman Modal Usaha dan Biaya Pelatihan Terhadap Peningkatan Omset Penjualan Usaha Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), 2007 | 72 |
| Tabel 16. | Hasil Analisis Pengujian Secara Parsial Pengaruh Variabel Jumlah Pinjaman Modal dan Biaya Pelatihan Terhadap Peningkatan Omset Penjualan Usaha Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), 2007 | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang sangat dinamis, sektor usaha kecil sebagai pelaku ekonomi perlu mendapat perhatian. Sektor ini merupakan tulang punggung dan basis perekonomian nasional, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha serta pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah berupaya melakukan pembinaan dan pengembangan serta perhatian serius terhadap sektor usaha kecil. Hal ini dilakukan agar sektor ini dapat menjadi kekuatan ekonomi nasional, melalui penciptaan iklim usaha dan pola perdagangan yang sehat, serta meningkatkan semangat dan kreatifitas usaha yang berdaya saing tinggi. Hasil survei BPS (2003), jumlah usaha kecil di Indonesia adalah 36.761.689 unit usaha yang tersebar pada berbagai lapangan usaha. Sedangkan jumlah usaha menengah adalah 51.889 unit, serta jumlah usaha besar adalah 1.831 unit. Informasi tersebut menunjukkan bahwa besarnya potensi untuk menghidupkan sistem ekonomi rakyat yang bertumpu pada usaha-usaha kecil.

Secara nasional, masalah pokok yang dihadapi oleh sektor usaha kecil saat ini adalah kurangnya modal kerja untuk membiayai kegiatan usaha, lemahnya manajemen produksi dan pemasaran, serta pengelolaan sumberdaya manusia., sehingga sektor ini kurang mampu memanfaatkan

peluang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk barang dan jasa yang makin meningkat kuantitas dan kualitasnya. Peran pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil masih terbatas pada pembinaan organisasi, dan manajemen. Sedangkan pembinaan kemampuan manajerial, keterampilan sumberdaya manusia utamanya dalam teknik produksi dan pemasaran hasil, serta bantuan permodalan yang dilakukan selama ini belum berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu koordinasi antara pemerintah, lembaga keuangan, pihak swasta serta para pengusaha.

Posisi setiap pelaku ekonomi, baik usaha kecil, usaha menengah, maupun perusahaan besar mempunyai kedudukan yang sama sehingga proses yang berkaitan dengan pemenuhan modal pinjaman dan pembinaan melalui lembaga keuangan dan BUMN harus diperlakukan sama. Banyak pengelola usaha kecil yang berpendapat bahwa syarat-syarat yang digunakan oleh lembaga keuangan utama perbankan justru memberatkan bagi usaha mereka. Sehingga kesempatan yang seharusnya sama antara usaha kecil, usaha menengah dan perusahaan besar untuk memanfaatkan modal pinjaman, menjadi berkurang bagi usaha kecil akibat persyaratan tersebut. Salah satu aspek yang menjadi masalah adalah mekanisme pengambilan kredit dan ketentuan bank yang dianggap terlalu ketat. Syarat-syarat yang biasanya harus dipenuhi oleh pihak usaha kecil adalah harus memiliki surat izin usaha, memiliki bukti atas kepemilikan tanah yang dijadikan sebagai agunan atau

jaminan, melampirkan laporan keuangan selama satu tahun terakhir. Sementara dari pihak usaha kecil syarat-syarat tersebut sulit dipenuhi, sehingga mereka mendapat kesulitan dalam memperoleh pinjaman atau kredit untuk pengembangan usaha.

Setelah Indonesia melewati masa krisis, pembangunan ekonomi mulai bangkit hampir pada semua sektor usaha. Namun, keberhasilan tersebut memberikan pula dampak negatif terjadinya kesenjangan social ekonomi di tengah masyarakat. Kesenjangan ini sebagai akibat tidak meratanya kesempatan berusaha. Untuk itu diperlukan kebijakan dan strategi yang mengarah pada keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan pada usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar melalui pembinaan usaha kecil melalui kemitraan usaha, antara usaha yang kuat dan usaha yang lemah. Kemitraan usaha ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan usaha, serta penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

Pemerintah melalui Departemen Keuangan memberikan tugas kepada Lembaga Perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpartisipasi membantu usaha kecil menyalurkan bantuan modal kerja dan pembinaan usaha. Melalui bantuan kredit modal kerja dan pembinaan usaha diharapkan dapat membantu usaha kecil untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya pada berbagai sektor usaha.

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara di bawah Departemen Keuangan menjalankan tugas pokok berdasarkan UU Nomor 33 dan 34 Tahun 1964, yaitu memberikan santunan kepada masyarakat korban kecelakaan penumpang umum maupun kecelakaan lalu lintas jalan. Selain tugas pokok tersebut, PT. Jasa Raharja (Persero) diberikan tugas tambahan yaitu memberikan pembinaan usaha dan pinjaman modal kerja dengan bunga ringan kepada pengusaha kecil. Jumlah pinjaman modal usaha yang telah disalurkan kepada usaha kecil sebagai mitra binaan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Penyaluran Dana dan Jumlah Mitra Binaan BUMN PT. Jasa Raharja (Persero) Tahun 2001 – 2006.

| No. | Tahun | Target Penyaluran (Rp) | Realisasi Penyaluran (Rp) | Mitra Binaan (Unit) |
|-----|-------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. | 2001 | 400.000.000 | 400.000.000 | 49 |
| 2 | 2002 | 500.000.000 | 500.000.000 | 44 |
| 3 | 2003 | 500.000.000 | 500.000.000 | 34 |
| 4 | 2004 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 65 |
| 5 | 2005 | 900.000.000 | 900.000.000 | 60 |
| 6 | 2006 | 900.000.000 | 900.000.000 | 48 |

Sumber: Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, 2006

Realisasi penyaluran dana Program Kemitraan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada usaha kecil selama periode tahun 2001 – 2006 adalah sesuai dengan target penyaluran. Jumlah dana yang disalurkan dan jumlah

mitra binaan berfluktuasi jumlahnya karena dana tersebut berasal dari bagian keuntungan usaha BUMN sebagai bentuk partisipasi pemerintah terhadap perkembangan usaha kecil.

Pemberian bantuan pinjaman modal usaha dan pembinaan melalui program kemitraan berperan penting terhadap keberhasilan usaha kecil. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Pengaruh Pinjaman Modal Usaha dan Pembinaan Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Melalui Program Kemitraan pada PT. Jasa Raharja (Persero)"**.

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok penelitian adalah:

1. Bagaimana mekanisme pinjaman modal usaha dan pembinaan usaha melalui program kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil.
2. Bagaimana pemanfaatan dan pengembalian pinjaman modal usaha oleh usaha kecil.
3. Bagaimana pengaruh variabel pinjaman modal usaha dan pembinaan usaha terhadap perkembangan usaha kecil.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pinjaman modal usaha dan pembinaan usaha melalui program kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan dan pengembalian pinjaman modal usaha oleh usaha kecil.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel pinjaman modal dan pembinaan usaha terhadap perkembangan usaha kecil.

Sedangkan kegunaan dari penelitian adalah:

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, khususnya dalam pembinaan usaha kecil, serta dalam membangun sistem perekonomian nasional.
2. Sebagai bahan informasi bagi usaha kecil dalam mengajukan bantuan kredit untuk mengembangkan kegiatan usahanya, khususnya bagi usaha kecil yang belum memperoleh akses perbankan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, dimana pada masing-masing bagian/bab terdiri atas beberapa sub bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang akan menguraikan latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan serta manfaat penelitian.

Bab kedua merupakan bab yang menguraikan tentang tinjauan pustaka, yang terdiri atas landasan teori tentang pengertian usaha kecil, perkembangan usaha, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha, kemitraan usaha, kerangka pikir dan hipotesis.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian, yang terdiri atas obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis, dan teknik pengujian hipotesis

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Usaha Kecil

Sektor usaha kecil merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan penting dalam mengatasi dampak dari krisis yang melanda Indonesia. Kondisi ini disebabkan sektor usaha kecil memiliki beberapa keunggulan dibanding usaha menengah dan usaha besar, yaitu memiliki jumlah yang banyak, mampu menyerap tenaga kerja, menggunakan sumberdaya bahan baku lokal serta usahanya yang relatif fleksibel. Walaupun memiliki beberapa keunggulan, namun usaha kecil dihadapkan pada berbagai masalah, yaitu masalah kurangnya modal untuk pengembangan usaha, kemampuan manajemen usaha yang lemah, serta kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah.

Kriteria usaha kecil di Indonesia masih sangat bervariasi. Usaha kecil pada umumnya diartikan dengan usaha-usaha yang sulit berkembang. Usaha-usaha tersebut dikatakan kecil karena memiliki keterbatasan modal, rendahnya penguasaan teknologi, manajemen yang digunakan sangat sederhana, serta penggunaan tenaga kerja yang terbatas. Usaha kecil merupakan kelompok pelaku usaha terbesar di Indonesia. Pada tahun 2002, jumlah unit usaha di Indonesia adalah kurang lebih 40 juta unit, dimana 38 juta unit merupakan usaha kecil (Sadoko, 2003).

Bank Indonesia menetapkan bahwa batas maksimal kredit untuk usaha kecil adalah Rp 50 juta, sesuai asset atau angka penjualan yang dimiliki di bawah 250 juta per tahun. Selanjutnya menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah.
3. Milik warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan.
5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Menurut BPS (2005), bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 5 – 20 orang, termasuk tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar. Secara umum usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Fleksibel dalam arti jika memperoleh hambatan dalam menjalankan usahanya akan mudah berpindah ke usaha lain.

2. Menggunakan bahan baku lokal, sehingga tidak bergantung pada bahan baku import.

2.1.2. Perkembangan Usaha Kecil

Suatu usaha bertujuan ingin mencapai sasaran yang telah ditetapkan, atau ingin mencapai keberhasilan usaha. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan usaha adalah melakukan penilaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja dapat pula sebagai masukan untuk perbaikan atau peningkatan kinerja usaha selanjutnya.

Menurut Benedicta (2003), bahwa kinerja usaha dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau tingkat pencapaian tujuan organisasi. Cara penilaian kinerja suatu usaha dapat diukur dari besarnya keuntungan usaha yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Lestari (1999) bahwa salah satu kriteria untuk mengukur keberhasilan usaha adalah melihat rasio finansial (profitabilitas usaha).

Namun untuk mengukur tingkat perkembangan usaha tidak cukup dilakukan hanya dengan menggunakan pengukuran keuangan saja, tetapi juga sebaiknya mempertimbangkan aspek-aspek lain. Menurut Lestari (1999) pengukuran kinerja usaha hanya dengan menggunakan aspek keuangan memiliki banyak kelemahan, antara lain tidak mampu mengukur kinerja sumberdaya manusia. Pengukuran kinerja usaha dapat dilakukan melalui empat kriteria pengukuran, yaitu: (1) aspek keuangan, (2) pelanggan, (3) proses internal, dan (4) proses pertumbuhan.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan KepMen BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil, bahwa keberhasilan usaha kecil setelah mendapat pinjaman modal usaha dan bantuan pembinaan dari BUMN selama minimal satu tahun dapat dinilai berdasarkan: omset produksi atau penjualan usaha meningkat, penggunaan tenaga kerja meningkat, dan perluasan dan perbaikan tempat usaha.

Pemanfaatan pinjaman modal usaha untuk usaha kecil adalah suatu usaha setelah memperoleh pinjaman modal usaha harus dapat memberikan manfaat bukan hanya dari segi keuntungan usaha kecil, tetapi lebih dari itu perlu dinilai seberapa jauh manfaatnya terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Harus mampu menyerap tenaga kerja, dalam hal ini perlu diperhatikan pemilihan teknologi atau pemilihan usaha yang tepat sehingga dapat membuka peluang kerja.

Menurut KepMen BUMN (2003), bahwa tingkat pemanfaatan dana pinjaman oleh usaha kecil adalah dinilai berdasarkan persentase perbandingan antara jumlah dana yang dimanfaatkan untuk modal usaha terhadap jumlah dana yang diterima. Untuk mengukur tingkat pemanfaatan dana digunakan rumus:

$$\text{Pemanfaatan Dana} = \frac{\text{Jumlah dana yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah dana yang diterima}} \times 100\%$$



Kriteria penilaian tingkat pemanfaatan dana oleh usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Kategori tinggi, apabila tingkat pemanfaatan dana lebih besar dari 95% atau (95% - 100%)
2. Kategori sedang, apabila tingkat pemanfaatan dana terletak antara 90% hingga kurang dari 95% atau (90% - < 95%)
3. Kategori kurang, apabila tingkat pemanfaatan dana terletak antara 85% hingga kurang dari 90% atau(85% - < 90%)
4. Kategori kurang sekali, apabila tingkat pemanfaatan dana kurang dari 85% atau (< 85%)

Pengembalian pinjaman modal usaha dinilai berdasarkan ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman. Penggolongan kualitas pinjaman usaha kecil ditetapkan sebagai berikut:

1. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
2. Kurang lancar, adalah apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 1 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
3. Diragukan, adalah apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari dan

belum melampaui 360 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati bersama.

4. Macet, adalah apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha

Tingkat perkembangan suatu usaha setelah bermitra dengan perusahaan besar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

1. Pinjaman Modal Usaha

Upaya pengembangan usaha kecil selalu mengalami permasalahan yang cukup kompleks. Menurut Hafsah (2000), bahwa permasalahan dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil dikelompokkan atas dua bagian, yaitu masalah intern dan masalah ekstern. Yang termasuk kelompok masalah intern adalah; (1) keterbatasan permodalan, kurangnya akses terhadap perbankan, dan informasi pasar, (2) rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha kecil, dan (3) kemampuan penguasaan teknologi yang kurang memadai. Sedangkan yang termasuk kelompok masalah ekstern adalah: (1) iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pembinaan dan pengembangan usaha kecil,

(2) kebijakan pemerintah belum berjalan sesuai harapan, (3) kurangnya dukungan fasilitas, dan (4) masih kurangnya pembinaan dalam manajemen dan peningkatan kualitas SDM.

Menurut Subanar (1995), kelemahan serta hambatan dalam pengelolaan usaha kecil dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun masalah yang utama adalah sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik usaha. Pemilik usaha tidak mengetahui secara tepat ketutuhan modal kerja, kurangnya informasi bisnis. Kondisi tersebut menyebabkan usaha kecil sulit berkembang. Penambahan modal usaha berdampak langsung pada aktivitas usaha dan pengembangan usaha. Selanjutnya Suryana (2003) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara besarnya modal yang dimiliki oleh suatu usaha dengan tingkat keberhasilannya. Secara struktural kelemahan usaha kecil yang paling menonjol adalah kurangnya permodalan. Akibatnya terjadi ketergantungan usaha kepada kekuatan pemilik modal. Karena pemilik modal juga menguasai sumber-sumber bahan baku dan pemasaran, sehingga usaha kecil memiliki ketergantungan pada pemilik modal. Akibat dari ketergantungan tersebut, harga jual produk usaha kecil secara tidak langsung ditentukan oleh si pemilik modal. Usaha kecil berada dalam suatu lingkaran yang menyebabkan usaha tersebut sulit untuk berkembang.

Masalah permodalan terkait dengan lemahnya daya serap usaha kecil terhadap kredit modal yang ditawarkan. Penyebab rendahnya daya serap ini antara lain karena tingginya suku bunga kredit yang diberikan oleh perbankan, persyaratan pengajuan kredit yang memberatkan usaha kecil, serta minimnya informasi di kalangan usaha kecil. Selain itu, usaha kecil umumnya tidak mampu meminjam kredit di bank karena tidak memiliki izin usaha sebagai jaminan atau agunannya (BPS, 2004).

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil bahwa pengertian pembiayaan (pinjaman modal usaha) adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam rangka memperkuat permodalan usaha kecil.

Bentuk pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat adalah bantuan pinjaman modal usaha, yang meliputi:

- a. Kredit perbankan,
- b. Pinjaman lembaga keuangan bukan bank,
- c. Pinjaman dari dana penyesuaian sebagian laba BUMN, dan
- d. Jenis pembiayaan lainnya.

Menurut Kep Men BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, bahwa dana program kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan dari pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pemberian pinjaman modal usaha oleh BUMN sebagai perusahaan pembina adalah: (1) besarnya jumlah dana program kemitraan yang telah disalurkan, (2) tingkat pemanfaatan dana oleh mitra binaan, dan (3) tingkat pengembalian pinjaman oleh mitra binaan.

2. Pembinaan Usaha

Pembinaan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk bimbingan, pelatihan dan monitoring sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kusumo (2001) mengemukakan bahwa pembinaan usaha kecil pada dasarnya bertujuan untuk: (1) menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil yang akan memberikan peluang berkembangnya usaha, dan (2) untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan ekonomi secara keseluruhan. Bentuk pembinaan yang dilakukan adalah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha kecil.

Pendidikan dan pelatihan merupakan faktor penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, produktivitas kerja, dan kualitas kerja. Menurut Alex Nitisemitra (1998) bahwa pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan dari perusahaan atau pemerintah yang bertujuan untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, pengetahuan dan keterampilan dari manajer dan karyawan, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Suad Husnan (1999) bahwa pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi.

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil bahwa pengertian pembinaan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pendidikan dan pelatihan, maka pendidikan dan pelatihan merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang terlibat di dalam aktivitas perusahaan. Pendidikan dan pelatihan oleh perusahaan-pembina adalah memberikan tambahan pengetahuan dan

keterampilan tentang kemampuan manajerial, kemampuan manajemen keuangan dan organisasi, serta keterampilan dalam proses produksi dan pemasaran.

Menurut KepMen BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil bahwa bentuk pembinaan yang dilakukan oleh BUMN sebagai perusahaan Pembina adalah: (1) memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajerial, teknik produksi, dan pemasaran, dan (2) melakukan kunjungan/monitoring untuk mengetahui perkembangan usaha kecil.

Hasil penelitian Anugerah (2005) menyimpulkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara pembinaan usaha pada usaha skala mikro dengan peningkatan keuntungan usaha. Usaha skala mikro setelah mendapatkan pendidikan dan pelatihan berusaha dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Makassar mengalami perkembangan usaha, dimana telah terjadi peningkatan keuntungan usaha rata-rata 24,75% per tahun dan peningkatan penggunaan tenaga kerja rata-rata 5,7% per tahun.

2.1.4. Pengertian Kemitraan

Pengertian kemitraan menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau antara usaha kecil dengan perusahaan besar dengan

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan saling membesarkan.

Definisi kemitraan tersebut di atas mengandung makna sebagai tanggung jawab moral pengusaha besar/menengah untuk membimbing dan membina usaha kecil agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk meraih keuntungan dan kesejahteraan bersama. Ini berarti bahwa masing-masing pihak yang bermitra harus menyadari bahwa mereka memiliki perbedaan, masing-masing memiliki keterbatasan baik di dalam manajemen, penguasaan IPTEK maupun penguasaan sumberdaya. Mereka harus mampu saling mengisi dan melengkapi kekurangan masing-masing.

Menurut Baharsjah (1997), pembinaan kemitraan bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi semua pelaku ekonomi (BUMN, swasta, dan koperasi) harus saling mendukung dan menunjang serta turut berperan dalam terwujudnya sistem perekonomian nasional. Hal ini berarti bahwa kemitraan usaha mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterampilan antara pelaku kemitraan, yaitu:

1. Saling memerlukan, dalam arti perusahaan besar memerlukan pasokan bahan baku dan usaha kecil memerlukan pemasaran hasil dan bimbingan usaha.
2. Saling memperkuat, dalam arti baik usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar sama-sama melakukan kegiatan usaha menggunakan etika bisnis, mempunyai persamaan hak dan saling membina sehingga akan memperkuat kesinambungan bermitra.
3. Saling menguntungkan, yaitu baik usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar sama-sama memperoleh peningkatan pendapatan yang menguntungkan semua pelaku kemitraan.

Sukartawi (2000) mengatakan bahwa kemitraan merupakan suatu proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan dan terus memonitor serta mengevaluasi sampai target sasaran tercapai. Dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan.

Selanjutnya menurut Jafar Hafsah (2000), bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan. Strategi bisnis ini merupakan kerjasama antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi

lainnya. Seperti antara perusahaan asing dengan perusahaan dalam negeri, antara perusahaan besar dan kecil, antara BUMN dengan usaha kecil, menengah dan koperasi, atau antara pelaku bisnis sektor formal dan informal.

Dalam kemitraan diharapkan perusahaan besar dan BUMN dapat bekerjasama saling menguntungkan dengan pelaku ekonomi lainnya, khususnya usaha kecil. Kegagalan program kemitraan dapat terjadi bila landasan dari kemitraan kurang kuat, hanya berdasarkan belas kasihan atau atas dasar paksaan. Bukan atas kebutuhan dan keinginan untuk berkembang dari masing-masing pihak yang bermitra. Walaupun kemitraan dilaksanakan berdasarkan keinginan bersama, namun sering terjadi kedudukan usaha kecil yang lemah dan usaha besar yang sangat dominan, dan cenderung ingin mengeksploitasi yang kecil. Selain itu, lemahnya manajemen, penguasaan teknologi, dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh usaha kecil sering menjadi faktor kegagalan program kemitraan.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995, Tentang Usaha Kecil, pasal 27 menyebutkan bahwa kemitraan dilaksanakan berdasarkan pola kemitraan yang sesuai sifat, kondisi dan tujuan bermitra. Pola hubungan kemitraan terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

1. Pola inti plasma, merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu contoh kemitraan ini adalah pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), dimana perusahaan ini menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, dan memasarkan hasil, sedangkan kelompok mitra usaha memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang disepakati.

2. Pola sub kontrak, merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan sesuai keperluan perusahaan. Pola kemitraan ini dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Namun terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pola kemitraan ini adalah adanya kecenderungan hubungan monopoli terhadap produsen kecil dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran, yaitu harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah. Komponen yang sangat berperan dalam pelaksanaan pola kemitraan adalah sumberdaya manusia yang terampil dalam penguasaan teknologi produksi yang dihasilkan sangat mendorong terlaksananya hubungan kemitraan yang berkelanjutan.
3. Pola waralaba, merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra yang memberikan lisensi, merek dagang, saluran distribusi kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bimbingan manajemen. Kelebihan pola waralaba adalah kedua pihak yang bermitra sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan hak dan kewajibannya, penghematan modal dan membuka kesempatan kerja yang luas. Sedangkan kelemahannya adalah bila salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga terjadi perselisihan.

4. Pola pembinaan, merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan pembina dengan kelompok mitra binaan dimana perusahaan pembina memberikan pembinaan usaha dan bantuan modal usaha secara murni tanpa adanya hubungan bisnis. Sumber utama dana pembinaan berasal dari penyisihan laba BUMN sebagai bentuk partisipasi pemerintah terhadap pemberdayaan usaha kecil. Program pembinaan ini bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil sebagai mitra binaan agar menjadi tangguh dan mandiri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Kriteria usaha kecil yang dapat bermitra dengan perusahaan pembina adalah diutamakan bagi usaha kecil yang belum memiliki akses perbankan.

Untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan partisipasi pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi social masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui program kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003, bahwa Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil sebagai mitra binaan agar menjadi tangguh dan mandiri, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat

dan lingkungan sekitarnya, melalui pemanfaatan dana pinjaman dari bagian laba BUMN.

2.2. Kerangka Pikir

Peningkatan kegiatan usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan dapat dicapai dengan mengembangkan potensi usaha kecil melalui program kemitraan antara perusahaan besar dengan usaha kecil. Pola kemitraan yang dimaksud adalah program kemitraan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan pembina dengan usaha kecil sebagai mitra binaan dengan mengutamakan prinsip saling memperkuat, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan.

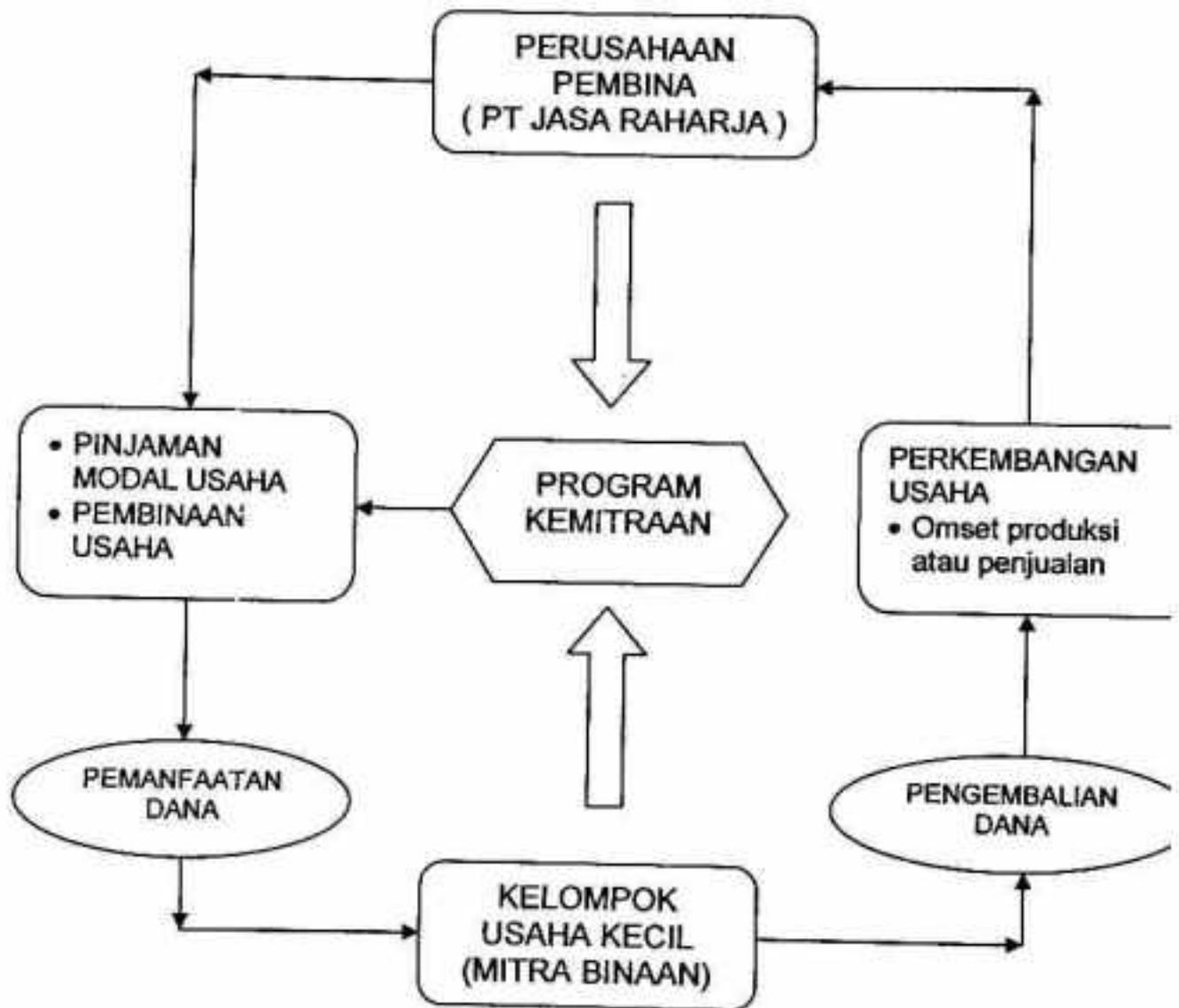
PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu BUMN di bawah naungan Departemen Keuangan menjalankan tugas pokok memberikan dana santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Selanjutnya perusahaan tersebut mendapat tugas tambahan oleh pemerintah yaitu memberikan bantuan pinjaman modal usaha dan pembinaan terhadap usaha kecil.

Bantuan pembiayaan usaha diberikan dalam bentuk pinjaman modal usaha dengan bunga ringan kepada usaha kecil, selanjutnya dana tersebut digunakan sebagai modal kerja untuk pembelian barang-barang modal dan alat-alat produksi. Mitra binaan yang telah memperoleh pinjaman modal usaha, selanjutnya ingin diketahui bagaimana alokasi pemanfaatan dana dan

tingkat pengembalian dana kepada BUMN sebagai perusahaan pembina. Bentuk pembinaan yang diberikan oleh perusahaan pembina adalah memberikan pengetahuan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, teknis produksi, manajemen dan pemasaran. Selain itu, perusahaan pembina melakukan kunjungan/monitoring untuk memantau perkembangan usaha.

Usaha kecil yang telah memperoleh bantuan pinjaman modal usaha dan pembinaan dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan monitoring perkembangan usaha dari perusahaan pembina, diharapkan dapat berkembang usahanya. Tingkat perkembangan usaha kecil dinilai berdasarkan indikator: peningkatan omset penjualan usaha kecil yang setelah memperoleh pinjaman modal usaha dan pelatihan dari perusahaan Pembina. Selanjutnya, tingkat perkembangan usaha mitra binaan setelah memperoleh pinjaman modal usaha dan pembinaan menjadi indikator untuk menilai keberhasilan kinerja program kemitraan BUMN sebagai perusahaan pembina.





Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

2.3. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah dikemukakan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Diduga bahwa pemberian pinjaman modal usaha dan pembinaan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembina (BUMN) dapat mempengaruhi perkembangan usaha kecil (mitra binaan).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor BUMN PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan yang terletak di jalan Dr. Sam Ratulangi nomor. 77 Makassar. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian meliputi seluruh usaha kecil yang merupakan mitra binaan BUMN PT. Jasa Raharja (Persero) selama periode pembinaan tahun 2004 – 2006. Populasi penelitian berjumlah 137 unit usaha kecil, yang tersebar pada beberapa wilayah kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan.. Sampel penelitian ditentukan secara purposive, yaitu mengambil secara sengaja seluruh usaha kecil mitra binaan pada wilayah Kota Makassar, yang berjumlah 41 unit usaha kecil.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data/informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung dan wawancara dengan pimpinan dan karyawan perusahaan pada PT.Jasa Raharja (Persero). Wawancara juga dilakukan terhadap mitra binaan untuk mengetahui

perkembangan usaha setelah memperoleh pinjaman modal usaha dan pembinaan usaha.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan literatur-literatur pendukung untuk menunjang penelitian sebagai landasan teoritis.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh berbentuk angka-angka, meliputi jumlah penyaluran dan pengembalian dana, perkembangan usaha mitra binaan (keuntungan usaha dan jumlah tenaga kerja) setelah mendapat bantuan dana, dan sebagainya
2. Data kualitatif, yaitu berupa data yang tidak memerlukan proses perhitungan, atau data/informasi tidak berbentuk angka-angka, tetapi meliputi keadaan perusahaan secara umum, serta informasi-informasi dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari obyek penelitian melalui pengamatan atau wawancara secara langsung dengan pimpinan dan karyawan perusahaan, maupun wawancara langsung dengan mitra binaan (usaha kecil).
2. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari dokumen maupun laporan tertulis perusahaan berupa data volume penyaluran dana, sejarah

perkembangan perusahaan, serta informasi lainnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

3.5. Metode Analisis

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan, maka alat analisis yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis deskriptif terhadap mekanisme penyaluran dan pengembalian pinjaman modal usaha yang diberikan kepada mitra binaan.
2. Analisis tingkat pemanfaatan dan pengembalian dana pinjaman. Tingkat pemanfaatan dana pinjaman dinilai berdasarkan persentase perbandingan antara jumlah dana yang dimanfaatkan untuk modal usaha terhadap jumlah dana yang diterima. Untuk mengukur tingkat pemanfaatan dana digunakan rumus:

$$\text{Pemanfaatan Dana} = \frac{\text{Jumlah dana yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah dana yang diterima}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat pemanfaatan dana oleh usaha kecil adalah sebagai berikut:

- Kriteria tinggi, apabila tingkat pemanfaatan dana > 95%
- Kriteria sedang, apabila tingkat penyerapan dana 90% - 95%
- Kriteria kurang, apabila tingkat penyerapan dana 85% - <90%.
- Kriteria kurang sekali, apabila tingkat penyerapan dana < 85%.

Sedangkan analisis Kualitas Pinjaman adalah suatu penilaian tingkat pengembalian dana pinjaman program kemitraan berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran, dengan kriteria:

- Lancar : Tepat Waktu
 - Kurang Lancar : Terlambat 1 hari s.d 180 hari
 - Diragukan : Terlambat 181 hari s.d 360 hari
 - Macet : Terlambat lebih dari 360 hari.
3. Analisis statistik menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (variabel x) terhadap variabel terikat (variabel Y). Analisis data penelitian ini menggunakan program Bantu SPSS.

Model analisis regresi menggunakan rumus persamaan regresi berganda yang dikutip dari Sugiyono (2005), yaitu:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2X_2 + e$$

Y = variabel dependent, yaitu tingkat perkembangan usaha
(menggunakan parameter peningkatan omset penjualan = Rp)

X₁ = variabel independent, yaitu jumlah pinjaman modal usaha (Rp)

X₂ = variabel independent, yaitu biaya pendidikan dan pelatihan (Rp)

a = intersep

b₁ = koefisien regresi variabel X₁

b₂ = koefisien regresi variabel X₂

e = Error (faktor yang tidak terdefiniskan)

3.6. Definisi Operasional

1. Program kemitraan adalah pembinaan usaha oleh BUMN sebagai perusahaan pembina kepada usaha kecil sebagai mitra binaan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha kecil, mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan.
2. Perusahaan pembina adalah perusahaan pemerintah yaitu BUMN memberikan pembinaan usaha dan pinjaman modal usaha dengan bunga ringan kepada usaha kecil.
3. Usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sesuai UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, serta diutamakan usaha kecil yang belum pernah memanfaatkan akses perbankan.
4. Pembinaan usaha adalah perusahaan pembina memberikan pendidikan/keterampilan kepada usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan manajerial, teknik produksi dan pemasaran. Parameter yang digunakan adalah biaya pendidikan/pelatihan.
5. Pinjaman modal usaha adalah perusahaan pembina menyediakan dana untuk memperkuat permodalan usaha kecil. Parameter yang digunakan untuk mengukur adalah jumlah pinjaman yang diterima.
6. Tingkat perkembangan usaha adalah kemajuan usaha yang dicapai oleh mitra binaan setelah memanfaatkan pinjaman dana dan pembinaan dari perusahaan pembina. Indikator perkembangan usaha dinilai berdasarkan peningkatan omset penjualan usaha mitra binaan.

7. Pemanfaatan dana adalah kemampuan usaha kecil menggunakan pinjaman modal untuk kemajuan usahanya. Kriteria penilaian tingkat pemanfaatan dana dikelompokkan atas: tinggi, sedang, rendah, dan rendah sekali.
8. Pengembalian dana adalah kemampuan usaha kecil untuk membayar angsuran pokok dan bunga secara tepat waktu. Pengembalian dana pinjaman dikelompokkan berdasarkan kriteria: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG SULAWESI SELATAN

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Seiring dengan perkembangan zaman, maka meningkat pula segala kegiatan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan angkutan. Kini semakin mudah orang bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Hampir tidak ada lagi tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh hadirnya alat-alat angkutan yang semakin meningkat. Hal tersebut sangat menunjang kegiatan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Namun demikian tak dapat dihindari dampak dari kemajuan tersebut yakni timbulnya kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan kendaraan bermotor lainnya. Keadaan ini tentu saja memprihatinkan semua orang. Untuk meringankan masalah tersebut di atas, maka pemerintah berupaya melindungi masyarakat dengan jalan memberikan jaminan sosial berupa dana santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan penumpang umum dan lalu lintas jalan.

PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara di bawah Departemen Keuangan menjalankan tugas pokok berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,

yaitu memberikan santunan kepada masyarakat korban kecelakaan penumpang umum maupun kecelakaan lalu lintas jalan.

Misi dan tugas yang diemban adalah melaksanakan dan mengelola Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berupa pemberian Dana Santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan kendaraan bermotor penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 dan Nomor 34 Tahun 1964, dalam pelaksanaannya setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak masyarakat adalah :

- a. Setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor penumpang umum seperti bis, non bis, kapal laut nasional, kapal penyeberangan sungai dan danau, kereta api dan pesawat udara nasional yang telah membayar iuran wajib melalui pengusahanya, berhak memperoleh Dana Santunan bila mengalami musibah dalam perjalanannya.
- b. Setiap orang yang tertabrak oleh kendaraan bermotor di jalan umum berhak memperoleh dana santunan.

2. Kewajiban Masyarakat adalah:

- a. Sebagai penumpang yang sah, wajib membayar karcis dan iuran wajib penumpang. Cara pembayaran iuran wajib penumpang melalui

pengusaha angkutan umum yang bersangkutan. Dari iuran wajib ini akan terkumpul Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang yang akan dipergunakan untuk memberikan Dana Santunan.

- b. Pemilik kendaraan bermotor setiap tahun membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLL) yang dibayar bersama dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada saat mengurus STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Dari Sumbangan Wajib ini akan terkumpul Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dipergunakan untuk pemberian Dana Santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan (misalnya, orang tertabrak kendaraan bermotor di jalan umum). Cara pembayaran Sumbangan Wajib melalui petugas Jasa Raharja di Kantor SAMSAT.

Selain tugas pokok tersebut di atas, oleh pemerintah PT. Jasa Raharja (Persero) diberikan tugas tambahan yaitu sebagai Badan Usaha Milik Negara Pembina yang memberikan bantuan dana pinjaman lunak dengan bunga ringan kepada pengusaha kecil dan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil.

2. Peran BUMN PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membantu pembinaan dan pengembangan usaha kecil, oleh karena itu pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 telah mengamanatkan kepada BUMN untuk berpartisipasi membantu memberdayakan usaha kecil. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, selanjutnya diterbitkan keputusan menteri untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN, yaitu Keputusan MenKeu Nomor: 1232/KMK.013/1989. Keputusan MenKeu Nomor: 316/KMK.016/1994. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor: Kep-197/M-PBUMN/1997 dan Nomor Kep-216/M-PBUMN/1997.

Sering dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang sangat dinamis, pedoman yang telah diterbitkan tersebut ternyata belum dapat memenuhi harapan masyarakat utamanya usaha kecil dan kebutuhan pengelola dalam pelaksanaan program, maka pemerintah melalui Kementerian BUMN mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil.

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara berperan serta dalam pelaksanaan program kemitraan. Tujuan pelaksanaan Program Kemitraan adalah untuk mengembangkan potensi/kemampuan usaha kecil sebagai mitra binaan agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara perusahaan Pembina PT. Jasa Raharja (Persero) dengan usaha kecil melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara.

Pelaksanaan Program Kemitraan dilaksanakan oleh suatu unit kerja yang dibentuk secara khusus dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari organisasi perusahaan Pembina secara keseluruhan. Mekanisme pelaksanaan pembinaan Program Kemitraan meliputi: bentuk bantuan Program Kemitraan, status bantuan Program Kemitraan, dan kriteria calon mitra binaan.

1. Bentuk Bantuan Program Kemitraan

Bentuk bantuan yang dilakukan oleh PT. Jasa raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan terhadap usaha kecil sebagai mitra binaannya adalah:

- a. Peningkatan kemampuan modal kerja dalam bentuk memberikan pinjaman modal usaha untuk pembelian barang modal atau alat produksi, dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha mitra binaan.

- b. Pembinaan usaha dalam bentuk memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan manajerial, keterampilan teknis produksi dan pemasaran, serta keterampilan manajemen keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM).

PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan telah melakukan pembinaan terhadap 395 unit usaha kecil. Pembinaan usaha melalui Program Kemitraan mulai dilaksanakan sejak tahun 1999 hingga sekarang. Nilai bantuan yang telah disalurkan adalah sebesar Rp5.300.203.000,-. Pola keterkaitan antara PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan dengan Usaha Kecil sebagai mitra binaan adalah "Pola Pembinaan". Dalam kerjasama ini PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan hanya melakukan pembinaan murni kepada usaha kecil tanpa adanya hubungan bisnis usaha.

2. Status Bantuan Pembinaan

Sumber dana program kemitraan berasal dari penyisihan laba setelah pajak dari PT. Jasa Raharja (Persero) sebesar 1 – 3 %. Status bantuan pembinaan program kemitraan dalam bentuk:

- a. Pinjaman, untuk membiayai modal kerja, pembelian barang-barang modal, seperti: mesin, alat produksi dan sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk mitra binaan. Pinjaman modal usaha tersebut diprioritaskan pada usaha kecil yang belum

memiliki akses perbankan, dan yang tidak memiliki kaitan usaha dengan BUMN Pembina, namun diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.

- b. Hibah, untuk membiayai bantuan pendidikan dan pelatihan mitra binaan dalam rangka meningkatkan keterampilan manajerial, keterampilan teknik produksi dan pemasaran, dan keterampilan manajemen keuangan.

3. Kriteria Calon Mitra Binaan

Peruntukan dana program kemitraan adalah untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan adalah sebagai berikut:

- a. Milik warga Negara Indonesia
- b. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum.
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Namun diutamakan yang mempunyai asset di bawah Rp 50 juta.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan, atau cabang dari usaha menengah atau usaha besar.
- e. Telah melakukan kegiatan usaha minimal satu tahun, serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Selain kriteria usaha kecil calon mitra binaan yang dapat ikut serta dalam program kemitraan tersebut di atas, program kemitraan ini diprioritaskan kepada usaha kecil, yaitu

- a. Program kemitraan ditujukan terutama untuk usaha kecil yang memiliki asset di bawah Rp 50 juta,-
- b. Belum memiliki akses perbankan.
- c. Program kemitraan dapat dilakukan kepada usaha kecil yang tidak memiliki kaitan usaha maupun yang memiliki kaitan usaha dengan BUMN Pembina.

PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan sebagai BUMN Pembina bertugas mengevaluasi dan menyeleksi kelayakan usaha, serta menetapkan calon mitra binaan. Sedangkan calon mitra binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh perusahaan Pembina.
- b. Mengelola dana sesuai dengan rencana yang telah diajukan sebelumnya.
- c. Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan secara tertib
- d. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4.3. Struktur Organisasi Program Kemitraan PT.Jasa Raharja (Persero).

Sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Jasa Raharja (Persero) No.SKEP/85/XI/2002 tanggal 28 Nopember 2002 tentang Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero), Struktur Organisasi Urusan Program Kemitraan, sebagai berikut:

1. Urusan Program Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi Keuangan.
2. Kepala Urusan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu: (a) Pelaksana Survei dan Analisa, dan (b) Pelaksana Administrasi.

Tugas Kepala Urusan Program Kemitraan adalah bertanggung jawab atas:

1. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan serta pengamanan sumber daya di dalam dan di lingkungan unit kerja yang dipimpinnya, yaitu:
 - a. Memimpin penyusunan rencana/program kerja dan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
 - b. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan atas rencana/program kerja yang disusunnya.
 - c. Memimpin, memotivasi dan membina pegawai bawahannya.
 - d. Merencanakan dan mengembangkan sumberdaya manusia, mengamankan alat dan sarana fisik di dalam unit kerja yang dipimpinnya.

- e. Melakukan kerjasama dengan unit kerja yang lain di dalam perusahaan.
 - f. Membina hubungan baik dengan instansi/pihak luar yang berhubungan dengan kegiatan unit kerjanya.
 - g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di dalam unit kerja yang dipimpinnya.
 - h. Memberikan sarana penyempurnaan sistem dan prosedur di dalam unit kerjanya kepada atasan langsung.
 - i. Mengusulkan pengembangan keahlian dan pengetahuan pegawai di dalam unit kerja yang dipimpinnya.
 - j. Memastikan tersusunnya laporan kegiatan unit kerja yang dipimpinnya sesuai batas waktu yang ditentukan.
2. Penyusunan rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang Program Kemitraan adalah:
- a. Memimpin penyusunan pembuatan rencana strategis termasuk kegiatan evaluasinya.
 - b. Bekerjasama dengan bagian keuangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pengalokasian dana Program Kemitraan.
 - c. Mengumpulkan dan menyusun data Program Kemitraan untuk keperluan Rapat Kerja.
3. Tersedianya penilaian atas hasil kegiatan bidang Program Kemitraan, yaitu:

- a. Menyarankan kriteria/tolok ukur keberhasilan bidang Program Kemitraan
 - b. Mengarahkan pelaksanaan teknis dan administratif di kantor cabang sehingga dapat memenuhi kriteria/tolok ukur yang ditetapkan.
 - c. Melaporkan hasil penilaian kegiatan Program Kemitraan di kantor cabang kepada kepala cabang dan diteruskan kepada Direksi PT Jasa Raharja (Persero).
4. Penilaian hasil kegiatan bidang Program Kemitraan terdiri atas:
- a. Memberikan angka penilaian atas hasil kegiatan di kantor cabang sesuai ketentuan yang telah digariskan.
 - b. Melaporkan hasil penilaian kepada atasan langsung.
- Kepala Urusan Program Kemitraan membawahi Pelaksana Survei dan Analisa serta Pelaksana Administrasi. Selanjutnya tugas Pelaksana Survei dan Analisa Program Kemitraan bertanggung jawab atas:
1. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan serta pengamanan sumberdaya di dalam dan di lingkungan unit kerja yaitu terdiri atas:
 - a. Memimpin dan memotivasi serta membina pegawai bawahannya.
 - b. Merencanakan dan mengamankan sumberdaya manusia, alat dan sarana fisik di dalam unit kerja yang dipimpinnya.
 - c. Melakukan kerjasama dengan unit kerja yang lain di dalam perusahaan.

- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di dalam unit kerja yang dipimpinnya.
 - e. Memberikan saran penyempurnaan sistem dan prosedur di dalam unit kerjanya kepada atasan langsung.
 - f. Memimpin penyusunan laporan termasuk hasil survei analisisnya atas kegiatan unit kerja yang dipimpinnya.
 - g. Menyiapkan data yang diperlukan dalam kaitan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan.
 - h. Membantu kelancaran kerja atasan serta di lingkungan unit kerjanya.
2. Kegiatan Survei dan Analisa calon Mitra Binaan, terdiri atas:
- a. Memimpin kegiatan survei dan analisis data yang berkaitan dengan permohonan bantuan dana dari calon mitra binaan.
 - b. Menyusun konsep penilaian kelayakan usaha calon mitra binaan yang akan diberi bantuan dana.
 - c. Menyusun konsep penilaian atas hasil kegiatan survei dan analisis data permohonan bantuan pembinaan pada kantor cabang.

Kepala Urusan Program Kemitraan membawahi Pelaksana Survei dan Analisa serta Pelaksana Administrasi. Selanjutnya tugas Pelaksana Administrasi Program Kemitraan bertanggung jawab atas:

1. Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan serta pengamanan sumberdaya di dalam dan di lingkungan unit kerjanya, yaitu terdiri atas:
 - a. Mengamankan sumberdaya manusia, alat dan sarana fisik di dalam dan di lingkungan unit kerjanya.
 - b. Melakukan kerjasama dengan unit kerja yang lain di dalam perusahaan.
 - c. Memberikan saran penyempurnaan sistem dan prosedur, di dalam unit kerjanya kepada atasan langsung.
 - d. Menyusun laporan kegiatan di dalam unit kerjanya.
 - e. Membantu kelancaran kerja atasan serta lingkungan unit kerjanya.
2. Penyusunan laporan kegiatan program kemitraan , terdiri atas:
 - a. Memimpin pengumpulan dan pengolahan data hasil pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan.
 - b. Menyusun laporan kegiatan Program Kemitraan
 - c. Mengumpulkan dan menyusun data program kemitraan untuk keperluan kegiatan rapat kerja.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Identitas responden yang terdiri atas: umur, pendidikan, pengalaman berusaha, dan jenis kegiatan usaha mempengaruhi kemampuan manajerial wirausaha, utamanya dalam hal perencanaan usaha, alokasi sumberdaya, serta dalam pengambilan keputusan.

Responden mitra binaan adalah usaha kecil yang memperoleh bantuan modal usaha dan pembinaan usaha dari perusahaan Pembina PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan. Selanjutnya identitas responden mitra binaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Umur

Umur merupakan kondisi yang menggambarkan berapa lama seseorang telah menjalani kehidupan. Kondisi tersebut dihitung sejak tahun kelahiran seseorang. Umur mempengaruhi kemampuan fisik untuk bekerja dan cara berfikir seseorang dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Umumnya semakin bertambah umur seseorang, maka semakin cenderung kemampuan fisiknya untuk bekerja relative menurun. Seorang wirausaha yang berusia muda dan sehat mempunyai kemampuan fisik yang lebih baik daripada yang berusia lebih tua.

Sebaran umur responden yang mendapat bantuan modal dan pembinaan dari perusahaan pembina disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), Kota Makassar, 2007

| No | Kelompok Umur | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|----|---------------|------------------|----------------|
| 1. | 27 – 36 | 12 | 29,27 |
| 2. | 37 – 46 | 13 | 31,71 |
| 3. | 47 – 56 | 11 | 26,83 |
| 4. | 57 – 66 | 5 | 12,19 |
| | Jumlah | 41 | 100,00 |

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2007

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur responden yang termuda berumur 27 tahun, dan responden yang tertua berumur 66 tahun. Rata umur responden adalah 44 tahun. Frekuensi tertinggi terdapat pada responden kelompok umur 37 – 46 tahun, yaitu sebanyak 13 responden atau 31,71 %, sedangkan frekuensi terendah terdapat pada responden kelompok umur 57 – 66 tahun, yaitu sebanyak 5 responden atau 12,19 %.

Selanjutnya pada Tabel 2 menunjukkan bahwa proporsi antara kelompok umur 27 – 36 tahun, kelompok umur 37 – 46 tahun, dan kelompok umur 47 – 56 tahun adalah seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan umur kapan seseorang ingin menggeluti suatu usaha.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan pada umumnya mempengaruhi cara berfikir seseorang. Pengusaha yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan berfikir lebih maju jika dibanding dengan pengusaha yang lebih rendah

pendidikannya. Dalam mengelola kegiatan usahanya, seorang pengusaha yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih tanggap terhadap perubahan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Tingginya tingkat kemampuan pemahaman dan penerapan terhadap inovasi teknologi, akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya.

Sebaran tingkat pendidikan responden mitra binaan yang mendapatkan bantuan modal dan pembinaan dari PT. Jasa Raharja (Persero) disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sebaran Responden Menurut Tingkat Pendidikan Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), Kota Makassar, 2007

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|----|--------------------|------------------|----------------|
| 1. | SLTP | 4 | 9,76 |
| 2. | SLTA | 26 | 63,41 |
| 3. | Diploma (D3) | 2 | 4,88 |
| 4. | Sarjana (S1) | 9 | 21,95 |
| | Jumlah | 41 | 100,00 |

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2007

Hasil penelitian pada Tabel 3 menggambarkan bahwa pendidikan terendah responden adalah tingkat SLTP, dan pendidikan tertinggi responden adalah sarjana (S1). Rata-rata tingkat pendidikan responden adalah tingkat SLTA. Proporsi responden tertinggi terdapat pada kelompok tingkat pendidikan SLTA, yaitu 20 orang atau 63,41%, sedangkan proporsi responden

terendah terdapat pada kelompok tingkat pendidikan diploma D1, yaitu sebanyak 2 orang atau 4,88%.

Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang wirausaha, khususnya usaha skala kecil, tingkat pendidikan bukan merupakan syarat mutlak keberhasilan suatu usaha.

3. Pengalaman Berusaha

Pengalaman berusaha adalah lamanya waktu yang ditempuh oleh responden dalam menggeluti usahanya. Lamanya menggeluti suatu usaha sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan usahanya. Semakin lama seseorang menjalankan kegiatan usahanya, maka semakin banyak pengalaman yang mereka peroleh sehingga semakin mampu dan terampil dalam mengelola usaha untuk mencapai keberhasilan. Sebaran pengalaman berusaha responden mitra binaan yang mendapat bantuan modal usaha dan pembinaan dari PT. Jasa Raharja (Persero) disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Sebaran Responden Menurut Pengalaman Berusaha Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), Kota Makassar, 2007

| No | Pengalaman Berusaha | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|----|---------------------|------------------|----------------|
| 1. | 3 - 9 | 21 | 51,22 |
| 2. | 10 - 16 | 13 | 31,71 |
| 3. | 17 - 23 | 6 | 14,53 |
| 4. | 24 - 30 | 1 | 2,44 |
| | Jumlah | 41 | 100,00 |

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2007

Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi responden terdapat pada interval pengalaman berusaha 3 – 9 tahun, yaitu sebanyak 21 responden atau 51,22%, sedangkan frekuensi terendah responden terdapat pada interval pengalaman berusaha 24 – 30 tahun, yaitu sebanyak 1 responden atau 2,44%. Tabel 4 juga menunjukkan bahwa pengalaman berusaha responden yang tertinggi adalah 29 tahun. Rata-rata pengalaman berusaha responden adalah 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang memperoleh bantuan modal dan pembinaan usaha memiliki pengalaman berusaha yang cukup lama. Melalui pengalaman berusaha yang dimiliki tersebut diharapkan dapat memanfaatkan bantuan modal dan pembinaan untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

4. Jenis Kegiatan Usaha

Jenis kegiatan usaha adalah pekerjaan yang ditekuni atau dilakukan oleh responden untuk memperoleh pendapatan. Jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh responden bervariasi. Sebaran jenis kegiatan usaha responden mitra binaan yang mendapat bantuan modal dan pembinaan dari PT. Jasa Raharja (Persero) disajikan pada Tabel 5.

Hasil penelitian pada Tabel 5 menunjukkan bahwa sektor usaha perdagangan menempati frekuensi tertinggi, yaitu terdapat 28 unit usaha atau 68,29%. Sedangkan sektor pertanian dengan frekuensi terendah yaitu 1 unit usaha atau 2,44%.

Tabel 5. Sebaran Responden Menurut Jenis Kegiatan Usaha Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), Kota Makassar, 2007

| No | Jenis Kegiatan Usaha | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|----|----------------------|------------------|----------------|
| 1. | Perdagangan | 28 | 68,29 |
| 2. | Industri | 5 | 12,20 |
| 3. | Pertanian | 1 | 2,44 |
| 4. | Sektor Jasa | 7 | 17,07 |
| | Jumlah: | 41 | 100,00 |

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2007

5.2. Mekanisme Penyaluran dan Pengembalian Dana Program Kemitraan

1. Mekanisme Penyaluran Pinjaman Modal Usaha Program Kemitraan

Penyaluran bantuan modal Program Kemitraan terdiri atas beberapa tahapan proses, yaitu: penerimaan dan evaluasi administrasi proposal program kemitraan, survei calon mitra binaan, evaluasi hasil survei lapangan, penetapan calon mitra binaan, dan pelaksanaan penyaluran pinjaman.

a. Penerimaan dan Evaluasi Administrasi Proposal

Prosedur penerimaan dan evaluasi administrasi proposal permohonan pinjaman pada program kemitraan melalui proses:

1) Penerimaan Proposal

Calon mitra binaan mengajukan proposal permohonan pinjaman dan disampaikan kepada penanggung jawab program kemitraan Kantor Cabang PT. Jasa Raharja (Persero). Proposal pengajuan pinjaman

dana dari calon mitra binaan disertai dengan persyaratan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Fotocopi kartu tanda penduduk
2. Fotocopi kartu keluarga
3. Surat izin dari suami/istri
4. Foto pemohon 1 (satu) lembar ukurna 4x6
5. Fotocopi PBB tempat usaha (jika ada)
6. Fotocopi NPWP, SIUP, atau SKU (jika ada)
7. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir
8. Denah lokasi tempat usaha

2) Registrasi dan Administrasi Proposal

Proposal yang diterima oleh bagian program kemitraan, lalu dicatat pada buku penerimaan surat permohonan pinjaman yang terdiri atas: nomor registrasi, tanggal penerimaan, nama pemilik dan nama usaha, jenis usaha serta domisili usaha.

3) Evaluasi Kelengkapan Administrasi

Proposal yang telah diterima selanjutnya dievaluasi oleh penanggung jawab program kemitraan kantor cabang PT. Jasa Raharja (Persero), dengan memperhatikan legalitas kelengkapan dokumen dan kelayakan calon mitra binaan sebagai usaha kecil.

4) Penerimaan dan Penolakan Proposal

Proposal yang memenuhi persyaratan dari hasil evaluasi administrasi oleh penanggung jawab program kemitraan kantor cabang, selanjutnya dibuatkan jadwal survey lapangan. Proposal yang kurang memenuhi persyaratan administrasi, oleh penanggung jawab program kemitraan diinformasikan kepada calon mitra binaan untuk segera melengkapi persyaratan yang dimaksud.

Sedangkan proposal yang tidak memenuhi persyaratan, diinformasikan kepada calon mitra binaan disertai dengan alasan penolakannya oleh penanggung jawab program kemitraan.

b. Survei Calon Mitra Binaan

Untuk mengetahui gambaran yang lebih nyata tentang profil usaha calon mitra binaan, maka penanggung jawab program kemitraan kantor cabang melakukan survei terhadap calon mitra binaan. Selain itu, untuk mencocokkan dan mengevaluasi kesesuaian antara kenyataan di lapangan dengan proposal yang diajukan.

Prosedur survei calon mitra binaan meliputi beberapa tahapan kegiatan, mulai dari penyusunan jadwal survei sampai dengan pelaksanaan survei lapangan, yang terdiri atas:

1) Penyusunan Jadwal Survei Lapangan

Berdasarkan dokumen proposal pengajuan pinjaman dari calon mitra binaan yang telah memenuhi persyaratan administrasi, kemudian

disusun jadwal untuk pelaksanaan survei lapangan. Jadwal survei lapangan disusun berdasarkan skala prioritas, yaitu jenis usaha, lokasi usaha, dan lain-lain.

2) Persiapan Survei Lapangan

Kegiatan persiapan survei lapangan yang disiapkan sebelum melakukan survei lapangan adalah mempersiapkan Surat Perintah Tugas, mempersiapkan dokumen dan peralatan yang akan digunakan dalam melaksanakan survei.

3) Pelaksanaan Survei Lapangan

Kegiatan survei lapangan yang dilakukan oleh penanggung jawab Program Kemitraan Kantor Cabang adalah:

1. Verifikasi nama calon mitra binaan dan nama usaha dengan bukti identitas (KTP, Kartu Keluarga, dll)
2. Observasi lokasi usaha
3. Mencari informasi tentang kemungkinan yang bersangkutan telah meminjam dana dari BUMN Pembina yang lain atau Bank
4. Verifikasi data-data yang terdapat di proposal dengan pembukuan atau catatan-catatan mengenai aspek teknis, keuangan dan pemasaran.
5. Melakukan wawancara dengan calon mitra binaan dan masyarakat lingkungan sekitar untuk menilai karakter atau kinerja calon mitra binaan.

c. Prosedur Evaluasi Hasil, Survei lapangan

Evaluasi hasil survei mitra binaan Program Kemitraan dimaksudkan sebagai pedoman untuk menentukan atau membuat kesimpulan tentang kelayakan calon mitra binaan untuk dibina oleh PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai perusahaan Pembina. Prosedur evaluasi hasil survei lapangan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1) Evaluasi Hasil Survei

Berdasarkan hasil survei lapangan yang dituangkan dalam formulir data dan informasi calon mitra binaan, selanjutnya petugas survei membuat kesimpulan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

1. Kelengkapan legalitas usaha,
2. Jumlah asset usaha,
3. Omset penjualan dan laba usaha,
4. Sudah atau belum dibina oleh bank atau lembaga keuangan lainnya
5. Jumlah dana pinjaman yang layak untuk diberikan

2) Penetapan Mitra Binaan Layak Bina

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, selanjutnya ditetapkan klasifikasi kelayakan usaha, terdiri atas:

1. Usaha layak bina
2. Usaha tidak layak bina

3) Pemberitahuan Penolakan Pinjaman

Apabila kesimpulan hasil evaluasi tersebut menyatakan bahwa calon mitra binaan tidak layak bina (tidak layak menerima pinjaman modal usaha dan pembinaan), maka petugas survei menginformasikan kepada yang bersangkutan mengenai alasan penolakan untuk dibina.

d. **Prosedur Analisa Kelayakan Pemberian Pinjaman Calon Mitra Binaan**

Berdasarkan data evaluasi hasil survei lapangan, maka ditetapkan calon mitra binaan yang layak untuk dibina oleh PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai perusahaan Pembina. Prosedur ini meliputi beberapa tahapan analisa dari hasil survei lapangan dan data-data pendukung lainnya, yaitu:

1). Analisa Kelayakan Pemberian Pinjaman Kepada Calon

Penanggung jawab Program Kemitraan Kantor Cabang melakukan analisa kelayakan pembinaan berdasarkan data evaluasi hasil survei dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Analisa karakteristik usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan harus memenuhi ketentuan: (a) Milik warga Negara Indonesia, (b) Berbentuk usaha perseorangan, bukan anak perusahaan, (c) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, (d) Memiliki omzet atau penjualan maksimum Rp 1 milyar per tahun, dan (e) Telah melakukan kegiatan usaha minimal satu

tahun, serta mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan.

2. Analisa Penetapan Jumlah Pinjaman. Permohonan pinjaman oleh calon mitra binaan dapat dipergunakan untuk menambah modal kerja atau untuk investasi, misalnya menambah peralatan atau mesin dengan harapan pendapatan atau laba usaha akan meningkat. Penetapan jumlah pinjaman disesuaikan dengan kemampuan calon mitra binaan membayar angsuran pinjaman setiap tahun. Cicilan ditetapkan tidak lebih dari 75% dari laba setelah mendapatkan pinjaman, dengan syarat perkiraan tambahan laba setelah mendapatkan pinjaman modal diperhitungkan maksimal sebesar laba usaha sebelumnya. Besarnya cicilan yang akan ditetapkan harus disesuaikan dengan kemampuan calon mitra binaan, yaitu dengan menganalisa arus kas calon mitra binaan untuk mengetahui proyeksi dana kas yang ada setiap bulan. Sehingga diharapkan besarnya cicilan yang ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan calon mitra binaan.

2) Proses Persetujuan Pemberian Pinjaman

Apabila hasil analisa kelayakan pemberian pinjaman modal tidak layak untuk dibina, maka diinformasikan kepada calon mitra binaan. Sedangkan yang layak untuk dibina, selanjutnya diajukan kepada kepala cabang melalui kepala bagian keuangan untuk

mendapat persetujuan pinjaman. Hasil analisa dan evaluasi kemudian disampaikan oleh kepala cabang kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan pemberina pinjaman dan pembinaan.

e. Pelaksanaan Penyaluran Pinjaman Modal Usaha

Pelaksanaan penyaluran pinjaman melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan konfirmasi ke calon mitra binaan, penandatanganan perjanjian pinjaman, dan transfer dana ke mitra binaan. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1) Konfirmasi kepada Calon Mitra Binaan

Setelah permohonan pinjaman disetujui oleh pejabat yang berwenang, maka penanggung jawab Program Kemitraan Kantor Cabang mengkonfirmasikan persetujuan tersebut kepada calon mitra binaan, apakah yang bersangkutan menyetujui besarnya pinjaman dan angsuran yang telah ditetapkan oleh perusahaan Pembina. Apabila calon mitra binaan tidak menyetujui penetapan tersebut, maka pengajuan pembinaan dapat dibatalkan.

2) Penandatanganan Surat Perjanjian

Apabila calon mitra binaan menyetujui, maka dilanjutkan dengan proses pembuatan draft Surat Perjanjian oleh penanggung jawab Program Kemitraan Kantor Cabang. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian antara Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) dengan calon mitra binaan.

3) Penyerahan Pinjaman Modal Usaha kepada Mitra Binaan

Setelah surat perjanjian ditandatangani oleh mitra binaan, kemudian penanggung jawab program kemitraan menyerahkan dana pinjaman dalam bentuk cek/giro secara langsung kepada mitra binaan yang bersangkutan, atau ditransfer ke rekening bank mitra binaan.

2. Mekanisme Pengembalian Pinjaman Dana Program Kemitraan.

Prosedur pengembalian dana pinjaman program kemitraan oleh mitra binaan dapat dilakukan secara tunai atau melalui bank.

a. Prosedur Pengembalian Angsuran Tunai

Penanggung jawab program kemitraan mencatat setiap penerimaan angsuran tunai dari mitra binaan, dengan memberikan kuitansi sebagai tanda terima pembayaran. Selanjutnya berdasarkan kuitansi pembayaran, kemudian dicatat pada kartu angsuran mitra binaan.

Penerimaan angsuran pinjaman mitra binaan disetor ke bank oleh penanggung jawab program kemitraan kantor cabang ke bank paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah uang diterima.

b. Prosedur Pengembalian Angsuran Melalui Bank

Penanggung jawab program kemitraan kantor cabang melakukan monitoring setiap bulan terhadap penerimaan angsuran melalui transfer bank dari mitra binaan, berdasarkan rekening koran bank bulanan program kemitraan PT. Jasa Raharja (Persero). Selanjutnya penanggung jawab

program kemitraan mencatat setiap penerimaan angsuran pada kartu daftar angsuran mitra binaan.

5.3. Pinjaman Modal dan Pembinaan Usaha Mitra Binaan

Kegiatan pinjaman modal usaha dan pembinaan usaha yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan terhadap usaha kecil sebagai mitra binaan adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman Modal Usaha

Pinjaman modal usaha yang disalurkan oleh perusahaan Pembina PT. Jasa Raharja (Persero) selama periode tahun 1999 – 2006 mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan keuntungan perusahaan pembinaan yang dicapai setiap tahun. Pinjaman modal usaha diberikan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja, misalnya untuk pembelian barang modal atau alat produksi, dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha mitra binaan.

PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan telah melakukan pembinaan terhadap 395 unit usaha kecil yang tersebar pada beberapa kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar, Pare-pare, Palopo, dan Kabupaten Gowa, Bone. Pembinaan usaha melalui Program Kemitraan mulai dilaksanakan sejak tahun 1999 hingga sekarang. Total nilai bantuan yang telah disalurkan Rp 5.300.203.000,-. Pola keterkaitan antara PT. Jasa Raharja (Persero) dengan usaha kecil sebagai mitra binaan adalah "Pola Pembinaan". Dalam kerjasama ini PT. Jasa Raharja (Persero)

hanya melakukan pembinaan murni kepada usaha kecil tanpa adanya hubungan bisnis usaha.

Bantuan modal usaha yang telah disalurkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Perkembangan Realisasi Penyaluran Pinjaman Modal Usaha dan Jumlah Mitra Binaan Program Kemitraan BUMN PT. Jasa Raharja (Persero), Periode Tahun 1999 – 2006.

| No. | Tahun | Target Penyaluran (Rp) | Realisasi Penyaluran (Rp) | Mitra Binaan (Unit) |
|-----|-------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. | 1999 | 700.203.000 | 700.203.000 | 60 |
| 2 | 2000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 35 |
| 3 | 2001 | 400.000.000 | 400.000.000 | 49 |
| 4 | 2002 | 500.000.000 | 500.000.000 | 44 |
| 5 | 2003 | 500.000.000 | 500.000.000 | 34 |
| 6 | 2004 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 65 |
| 7 | 2005 | 900.000.000 | 900.000.000 | 60 |
| 8 | 2006 | 900.000.000 | 900.000.000 | 48 |

Sumber: Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, Tahun 2007

Hasil survei pada Tahun 6 menunjukkan bahwa realisasi penyaluran dana Program Kemitraan BUMN PT. Jasa Raharja (Persro) kepada usaha kecil selama periode Tahun 1999 – 2006 adalah sesuai dengan target penyaluran. Jumlah dana yang disalurkan tersebut berasal dari keuntungan usaha BUMN yang merupakan bentuk partisipasi pemerintah untuk membantu kegiatan usaha kecil. Usaha kecil yang diprioritaskan memperoleh pembinaan

usaha dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha melalui Program Kemitraan adalah usaha kecil yang belum memiliki akses perbankan atau belum pernah dibina oleh perusahaan BUMN yang lain. Selanjutnya jumlah pinjaman modal usaha yang telah diterima oleh responden mitra binaan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Pinjaman Modal Usaha yang Diterima oleh Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), Kota Makassar, Periode Tahun 2004 - 2006

| No | Pinjaman Modal Usaha | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|----|----------------------|------------------|----------------|
| 1. | ≤ 10 juta | 19 | 46,34 |
| 2. | > 10 juta – 15 juta | 9 | 21,95 |
| 3. | > 15 juta – 20 juta | 3 | 7,32 |
| 4. | > 20 juta – 25 juta | 10 | 24,39 |
| | Jumlah | 41 | 100,00 |

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2007

Hasil penelitian pada Tabel 7 menunjukkan bahwa besarnya pinjaman modal usaha yang diterima oleh responden, terendah adalah Rp 5 juta dan tertinggi adalah Rp 25 juta. Frekuensi tertinggi terdapat pada pinjaman modal usaha interval kurang dari Rp 10 juta, yaitu 19 responden atau 46,34%, dan frekuensi terendah terdapat pada pinjaman modal usaha interval Rp 15 – 20 juta, yaitu 3 responden atau 7,32%. Pinjaman modal usaha yang diterima responden disesuaikan dengan kemampuan usaha kecil untuk mengembalikan angsuran pokok beserta bunga sesuai dengan kesepakatan.

Jangka waktu pinjaman modal usaha yang diterima oleh responden mitra binaan ditentukan sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati dengan perusahaan Pembina. Jangka waktu pengembalian tersebut maksimal tiga tahun. Besarnya jasa atau tingkat bunga pinjaman yang dikenakan kepada mitra binaan bersifat regresif, artinya semakin banyak jumlah pinjaman semakin tinggi pula tingkat bunga yang dikenakan. Tingkat bunga pinjaman modal usaha mitra binaan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Tingkat Bunga Pinjaman Program Kemitraan oleh Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), Kota Makassar, Periode Tahun 2004 – 2006.

| No | Jumlah Pinjaman Modal Usaha | Tingkat Bunga |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1. | ≤ 10 juta | 6 % |
| 2. | > 10 juta – 30 juta | 8 % |
| 3. | > 30 juta – 50 juta | 10 % |

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2007

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga pinjaman dengan nilai pinjaman kurang dari Rp 10 juta adalah 6% selama tiga tahun. Nilai pinjaman pada interval antara lebih besar Rp 10 juta sampai dengan Rp 30 juta dikenakan tingkat bunga 8%. Sedangkan nilai pinjaman pada interval antara lebih besar Rp 30 juta sampai dengan Rp 50 juta dikenakan tingkat bunga 10%.

Tingkat suku bunga pinjaman modal usaha yang dikenakan kepada mitra binaan tersebut berada jauh lebih rendah apabila dibanding dengan

suku bunga pada lembaga perkreditan lainnya. Hal ini dilakukan, sebab tujuan utama pemberian modal pinjaman usaha melalui Program Kemitraan adalah untuk membantu permodalan usaha kecil sehingga usahanya dapat lebih berkembang.

Agunan adalah suatu bentuk penjaminan atau kepastian yang dapat ditunjukkan atau diperlihatkan yang memiliki nilai dan kekuatan hukum atas kepemilikan barang tersebut. Responden mitra binaan pada saat mengajukan permohonan pinjaman kepada perusahaan Pembina, agunan bukan merupakan syarat mutlak untuk dibina. Pinjaman modal usaha melalui program kemitraan yang bernilai lebih besar dari Rp 20 juta, diharuskan melampirkan agunan/jaminan. Jenis agunan yang dilampirkan adalah fotocopi sertifikat tanah, bangunan, kendaraan atau akta jual beli tanah.

2. Pendidikan dan Pelatihan Mitra Binaan

Program Kemitraan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan sebagai perusahaan Pembina bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) mitra binaan dalam bentuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang keterampilan manajerial, keterampilan manajemen dan keuangan, serta keterampilan produksi dan pemasaran.

Sasaran pelaksanaan pelatihan kepada mitra binaan adalah sebanyak 40 mitra binaan setiap tahun. Mitra binaan yang telah mengikuti

pelatihan sebanyak 256 unit usaha. Frekuensi pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh responden mitra binaan dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Frekuensi dan Biaya Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti oleh Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), Kota Makassar, Periode Tahun 2004 - 2006

| No | Frekuensi Pendidikan dan Pelatihan | Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Rp / orang) | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|----|------------------------------------|---|------------------|----------------|
| 1. | Tidak pernah | 0 | 7 | 17,07 |
| 2. | Satu kali | ≤ 1 juta | 14 | 34,15 |
| 3. | Dua kali | 1,1 juta s/d 2 juta | 11 | 26,83 |
| 4. | Tiga kali | 2,1 juta s/d 3 juta | 9 | 21,95 |
| | Jumlah | | 41 | 100,00 |

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2007

Berdasarkan Tabel 9, bahwa frekuensi tertinggi mitra binaan yaitu 14 responden atau 34,15% telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak satu kali dengan biaya rata-rata Rp 1 juta per orang. Frekuensi terendah yaitu 7 responden atau 17,07% tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan selama dalam masa pembinaan Responden yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan frekuensi satu kali memperoleh materi keterampilan manajerial, keterampilan manajemen dan keuangan. Sedangkan responden yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dengan frekuensi dua dan tiga kali, memperoleh materi keterampilan manajerial, keterampilan manajemen /keuangan, serta teknik produksi dan pemasaran.

Sesuai KepMen BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, bahwa perusahaan Pembina diharuskan melakukan pembinaan usaha dalam bentuk memberikan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun selama dalam proses pembinaan sesuai dengan kemampuan dana operasional masing-masing BUMN Pembina. Anggaran biaya yang dialokasikan untuk setiap mitra binaan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah Rp 1 juta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan Kep Men tersebut.

5.4. Pemanfaatan dan Pengembalian Pinjaman Modal Usaha

1. Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha

Pinjaman modal usaha mitra binaan digunakan untuk membiayai modal kerja, untuk investasi, dan untuk perbaikan dan perluasan tempat usaha, dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan kegiatan usaha mitra binaan. Pemanfaatan pinjaman modal usaha mitra binaan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan bidang kegiatan usaha yang dilakukan masing-masing responden. Informasi tentang pemanfaatan pinjaman modal usaha dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini.

Hasil penelitian pada Tabel 10 menunjukkan bahwa terdapat 32 responden atau 78,05% memanfaatkan semua pinjaman modal usaha untuk keperluan pembiayaan modal kerja, pembelian mesin dan peralatan, serta

untuk perbaikan dan perluasan tempat usaha. Sedangkan 9 responden atau 21,95% menggunakan pinjaman modal usaha, selain untuk pembiayaan modal kerja, juga untuk memenuhi kebutuhan lain, yaitu untuk keperluan konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan untuk membiayai usaha lain.

Jumlah pinjaman modal usaha yang diterima responden adalah Rp612,5 juta, jumlah pinjaman yang dimanfaatkan untuk keperluan modal usaha adalah Rp 586,5 juta, sedangkan jumlah pinjaman yang dimanfaatkan untuk keperluan selain modal usaha, yaitu untuk pendidikan anak, konsumsi, untuk berobat sebanyak Rp 26 juta

Tabel 10. Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), Kota Makassar, Periode Tahun 2004 - 2006

| No | Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|----|---|------------------|----------------|
| 1. | Digunakan seluruhnya untuk modal usaha | 32 | 78,05 |
| 2. | Digunakan sebagian untuk kegiatan lain (selain modal usaha) | 9 | 21,95 |
| | Jumlah | 41 | 100,00 |

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2007

Selanjutnya pada Tabel 11 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan pinjaman modal usaha, yaitu 33 responden atau 80,48% termasuk kategori tinggi, sedangkan selebihnya termasuk kategori sedang, kurang dan kurang sekali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pemanfaatan dana mitra binaan termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel 11. Tingkat Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha oleh Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), Kota Makassar, Periode Tahun 2004 - 2006

| No | Tingkat Pemanfaatan Dana | Kriteria | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|----|--------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1. | > 95 % - 100 % | Tinggi | 33 | 80,48 |
| 2. | 90 % - 95 % | Sedang | 3 | 7,32 |
| 3. | 85 % - > 90 % | Kurang | 2 | 4,88 |
| 4. | < 85 % | Kurang sekali | 3 | 7,32 |
| | Jumlah | | 41 | 100,00 |

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2007

Kriteria pemanfaatan pinjaman modal usaha berdasarkan petunjuk Kep Men BUMN berada pada nilai interval 95 – 100%, sehingga termasuk dalam kategori tinggi.

2. Pengembalian Pinjaman Modal Usaha

Pengembalian pinjaman modal usaha adalah nilai angsuran pinjaman per bulan ditambah dengan suku bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh mitra binaan. Jumlah angsuran dan jangka waktu pengembalian pada masing-masing mitra binaan berbeda sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati bersama antara perusahaan pembina dengan usaha kecil mitra binaan.

Tingkat pengembalian pinjaman modal usaha dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan suku bunga pinjaman. Penggolongan kualitas pinjaman usaha kecil mitra binaan dikategorikan: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Tabel 12. Tingkat Pengembalian Pinjaman Modal Usaha Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), Kota Makassar, Periode Tahun 2004 - 2006

| No | Tingkat Pengembalian Pinjaman Modal Usaha | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|----|---|------------------|----------------|
| 1. | Lancar | 22 | 53,66 |
| 2. | Kurang lancar | 7 | 17,07 |
| 3. | Diragukan | 8 | 19,51 |
| 4. | Macet | 4 | 9,76 |
| | Jumlah | 41 | 100,00 |

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2007

Berdasarkan Tabel 12, bahwa frekuensi mitra binaan tertinggi yaitu 22 responden atau 53,66% mengembalikan pinjamannya tepat waktu dan termasuk kategori lancar. Sedangkan frekuensi terendah yaitu 4 responden atau 9,76% terlambat mengembalikan pinjamannya lebih dari 360 hari sehingga dikategorikan tingkat pengembalian macet.

Proses pengembalian angsuran pinjaman modal usaha oleh mitra binaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) penerimaan angsuran pinjaman melalui setoran tunai, dan (2) penerimaan angsuran pinjaman

melalui transfer bank. Selanjutnya pada Tabel 13 dapat dijelaskan proses pengembalian pinjaman modal usaha oleh mitra binaan.

Tabel 13. Proses Pengembalian Pinjaman Modal Usaha Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), Kota Makassar, Periode Tahun 2004 - 2006

| No | Proses Pengembalian Pinjaman Modal Usaha | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|----|--|------------------|----------------|
| 1. | Setoran tunai | 8 | 19,51 |
| 2. | Setoran transfer melalui bank | 33 | 80,49 |
| | Jumlah | 41 | 100,00 |

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2007

Hasil penelitian pada Tabel 13 menunjukkan bahwa terdapat 33 responden atau 80,49% yang mengembalikan angsuran pinjaman modal usaha melalui transfer bank, dan selebihnya 8 responden atau 19,51% yang mengembalikan melalui setoran tunai.

Alasana utama yang dikemukakan responden yang mengembalikan pinjaman modal usahanya melalui transfer bank adalah kemudahan (efisien waktu dan biaya). Pengembalian melalui transfer bank memang lebih mudah, namun menyebabkan keterlambatan pengembalian pinjaman karena transfer melalui bank tidak ada kontak langsung antara perusahaan Pembina dengan usaha kecil mitra binaan.

5.5. Perkembangan Usaha Mitra Binaan

Perkembangan usaha adalah kemajuan usaha yang dicapai oleh usaha kecil mitra binaan setelah memperoleh pinjaman modal usaha dan pembinaan dari perusahaan Pembina. Kriteria yang digunakan untuk mengukur perkembangan usaha mitra binaan setelah mendapatkan pinjaman modal usaha dan pembinaan dari PT. Jasa Raharja (Persero) adalah peningkatan omset penjualan.

Omset penjualan adalah nilai penjualan yang diperoleh responden mitra binaan dari kegiatan usaha yang dibina. Peningkatan omset penjualan diukur berdasarkan selisih omset penjualan antara sebelum dibina dengan setelah memperoleh pinjaman modal usaha dan pembinaan dari PT. Jasa Raharja (Persero). Selanjutnya hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Peningkatan Omset Penjualan Usaha Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero), Kota Makassar, Periode Tahun 2004 - 2006

| No | Peningkatan Omset Penjualan (Rp juta/bulan) | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|----|--|------------------|----------------|
| 1. | ≤ 0 | 4 | 9,76 |
| 2. | 1 - 5 | 28 | 68,29 |
| 3. | 6 - 10 | 8 | 19,51 |
| 4. | 11 - 15 | 1 | 2,44 |
| | Jumlah | 41 | 100,00 |

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2007

Hasil penelitian pada Tabel 14 menunjukkan bahwa peningkatan omset penjualan mitra binaan setelah memperoleh pinjaman modal usaha dan pembinaan adalah 28 responden atau 68,29% meningkat omset penjualannya antara 1 – 5 juta per bulan. Sedangkan terdapat 4 responden atau 9,76% omset penjualannya menurun.

5.6. Analisis Pengaruh Pinjaman Modal Usaha dan Biaya Pendidikan/Pelatihan Terhadap Perkembangan Usaha Mitra Binaan.

Hasil analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan program SPSS antara jumlah pinjaman modal usaha (variabel X_1) dan biaya pelatihan (variabel X_2) terhadap perkembangan usaha mitra binaan (variabel Y) diperoleh nilai-nilai sebagaimana terlihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Hasil Analisis Regresi Berganda Pengaruh Jumlah Pinjaman Modal Usaha, Biaya Pelatihan Terhadap Peningkatan Omset Penjualan Usaha Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero).

| No | Variabel Penelitian | Koefisien Regresi | t-hitung | t-signifikan |
|----|---------------------------------|-------------------|----------|--------------|
| 1. | Konstanta | 1,723 | -2,448 | 0.019 |
| 2. | Pinjaman modal usaha (X_1) | 0.171 | 2,736 | 0.009 |
| 3. | Biaya pelatihan (X_2) | 1,997 | 4,811 | 0.000 |
| 4. | Koefisien korelasi (R) | 0.858 | | |
| 5. | Koefisien determinasi (R^2) | 0.736 | | |
| 6. | F-hitung | 53.050 | | |
| 7. | F-signifikan | 0.000 | | |

Keterangan: **) = Nyata pada tingkat kepercayaan 99% ($\alpha = 0,01$)

*) = Nyata pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$)

Pada Tabel 15 diperoleh hasil nilai koefisien regresi $b_1 = 0,171$, nilai koefisien regresi $b_2 = 1,997$ dan nilai intercept $a = -1,723$ maka diperoleh bentuk hubungan hasil pendugaan model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,723 + 0,171 X_1 + 1,997 X_2$$

Tabel 15 tersebut di atas juga menyajikan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,858 menunjukkan bahwa variabel jumlah pinjaman modal usaha (X_1) dan variable biaya pendidikan/pelatihan (X_2) mempunyai hubungan yang kuat dengan tingkat perkembangan usaha mitra binaan. Dengan demikian semakin banyak jumlah pinjaman modal usaha dan semakin banyak biaya pendidikan/pelatihan, maka semakin tinggi peningkatan omset penjualan usaha mitra binaan.

Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,736, artinya proporsi variable Y yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 73,60%, sedangkan sisanya 26,40% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Dari persamaan tersebut di atas terlihat bahwa variabel independen yaitu jumlah pinjaman modal usaha dan pelatihan mempunyai hubungan yang positif dengan peningkatan omset penjualan usaha kecil mitra binaan. Nilai konstanta sebesar $-1,723$ menunjukkan bahwa jika perusahaan Pembina tidak memberikan pinjaman modal usaha dan pelatihan kepada mitra binaan, maka omset penjualan mitra binaan akan menurun.

1. Uji Simultan (Uji-F)

Sebagaimana telah dikemukakan dalam hipotesis penelitian bahwa diduga jumlah pinjaman modal usaha dan pendidikan/pelatihan mempengaruhi omset penjualan usaha kecil mitra binaan PT. Jasa Raharja (Persero). Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan Uji Simultan (Uji-F) pada tingkat signifikan ($\alpha_{0,05}$ dan $\alpha_{0,01}$). Uji-F dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai F-hitung dengan F-tabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F-hitung yang diperoleh sebesar 53,050 sedangkan nilai F-tabel ($\alpha_{0,05} = 2,84$) dan nilai F-tabel ($\alpha_{0,01} = 4,31$), sehingga nilai yang diperoleh adalah F-hitung > F-tabel. Dengan demikian variabel jumlah pinjaman modal usaha (X_1) dengan variabel biaya pendidikan/pelatihan (X_2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan omset penjualan usaha mitra binaan.

2. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial masing-masing variabel independen, yaitu jumlah pinjaman modal usaha (X_1) dan biaya pendidikan dan pelatihan (X_2). Melalui uji-t juga dapat diperoleh informasi tentang variabel mana yang memiliki pengaruh paling dominan. Uji-t dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai t-hitung dengan t-tabel. Apabila nilai t-hitung lebih besar dibandingkan dengan t-tabel, maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis regresi

diperoleh nilai koefisien parsial dari masing-masing variabel independen sebagaimana terlihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Hasil Analisis Pengujian Secara Parsial Pengaruh Variabel Jumlah Pinjaman Modal Usaha dan Biaya Pendidikan/Pelatihan Terhadap Peningkatan Omset Penjualan Usaha Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero).

| No | Variabel Penelitian | Nilai t-hitung | Nilai t-signifikan | Nilai t-tabel |
|----|--------------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 1. | Pinjaman modal usaha (X_1) | 2,736 | 0,009 | 1,645 |
| 2. | Biaya Pelatihan (X_2) | 4,811 | 0,000 | |

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jumlah pinjaman modal usaha (X_1) berpengaruh nyata (signifikan) terhadap omset penjualan usaha mitra binaan, karena nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($2,736 > 1,645$) atau nilai signifikansi ($t = 0,009 < t_{\alpha_{0,05}}$ dan $t_{\alpha_{0,01}}$). Nilai koefisien regresi X_1 adalah 0,171 menunjukkan bahwa penambahan satu satuan jumlah pinjaman modal usaha akan menaikkan omset penjualan usaha mitra binaan sebesar 0,171 satuan.

Variabel biaya pendidikan dan pelatihan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap omset penjualan usaha mitra binaan, karena nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($4,811 > 1,645$) atau nilai signifikansi ($t = 0,000 < t_{\alpha_{0,05}}$ dan $t_{\alpha_{0,01}}$). Nilai koefisien regresi X_2 adalah 1,997 menunjukkan bahwa penambahan satu satuan biaya pendidikan dan pelatihan (X_2) akan menaikkan omset penjualan usaha mitra binaan sebesar 1,997 satuan.

Berdasarkan uji-F dan uji-t yang dilakukan, maka diperoleh bahwa variabel bebas jumlah pinjaman modal usaha (X_1) dan variabel biaya pendidikan/pelatihan (X_2), baik secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh nyata (signifikan) terhadap perkembangan usaha/ peningkatan omset penjualan mitra binaan (Y). dengan demikian hipotesis yang diajukan terbukti dan diterima.

BAB. VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penyaluran pinjaman modal usaha melalui Program Kemitraan melalui 5 (lima) tahap, yaitu : (a) Penerimaan dan evaluasi administrasi proposal, (b) Survei lapangan calon mitra binaan, (c) Evaluasi hasil survei lapangan, (d) Penetapan calon mitra binaan, dan (e) Pelaksanaan penyaluran pinjaman. Sedangkan pembinaan usaha yang telah dilakukan adalah 34 responden atau 82,03% telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.
2. Tingkat pemanfaatan pinjaman modal usaha oleh mitra binaan termasuk kategori tinggi, yaitu 33 responden atau 80,48 memanfaatkan seluruh pinjaman untuk kegiatan usaha. Sedangkan tingkat pengembalian pinjaman modal usaha berdasarkan kualitas pinjaman termasuk kategori lancar.
3. Variabel pinjaman modal usaha dan pembinaan usaha, baik secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha mitra binaan. Dengan demikian untuk meningkatkan omset penjualan, maka pinjaman modal usaha dan pembinaan usaha perlu ditingkatkan pula.

6.2. Saran

1. Penyaluran dana Program Kemitraan sebaiknya menjangkau semua sektor perekonomian masyarakat utamanya usaha kecil yang belum mendapat akses perbankan.
2. Pemberian bantuan pinjaman modal usaha dan pembinaan usaha dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada mitra binaan, perlu terus ditingkatkan agar kegiatan usaha mitra binaan dapat terus meningkat.
3. Peningkatan jumlah pinjaman modal usaha dan pembinaan usaha sebaiknya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mitra binaan untuk kegiatan perkembangan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003. *Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL)*. Sekretariat Kementrian BUMN. Jakarta.
- Anonim, 2004. *Laporan Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi PT. Jasa Raharja (Persero)*, Cabang Sulawesi Selatan, Makassar.
- Anonim, 2004. *Standar Prosedur Operasi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Jasa Raharja (Persero)*, Jakarta.
- Arikunto Suharsimi, 1997. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Jafar Hafisah, 1997. *Peranan Lembaga Agribisnis Dalam Mendukung Pengembangan Kemitraan*, Sekretariat Badan Pengendali Bimas, Jakarta
- Jafar Hafisah, 2002. *Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- John Soeprihanto, 1998. *Manajemen Personalia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kamaruddin, 1998, *Manajemen Personalia*, Penerbit, Mandar Maju, Bandung.
- Murti Sumarni dan John Soeprihanto, 1998. *Pengantar Bisnis, Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Pasaribu, Amudi, 1998. *Pengantar Statistik*. Borta Gorat, Medan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, Lembaran Negara RI, Jakarta.
- Sadoko, dkk, 2001. *Pengembangan Usaha Kecil*, Penerbit Yayasan Akatiga, Bandung.
- Siagian, P. Sondang. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Sinungan Muchdarsyah 1999. *Manajemen Personalia*, Penerbit, Bumi Aksara, Jakarta.

- Soemita, A K, 1997. *Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*, Penerbit Tarsito. Bandung.
- Soeratno dan Aryad, Lincoln, 1993. *Metodologi Penelitian*. UPP- AMP, YKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono, 1997. *Statistik untuk Penelitian*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Sukartawi, 2002. *Manajemen Agribisnis*, Penerbit YKPN Malang.
- Sutawi, 2002. *Manajemen Aribisnis*, Penerbit, Angkasa Bandung.

Lampiran 1. Identitas Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero)
Kota Makassar, Tahun 2007

| No. | Nama Usaha | Jenis Usaha | Umur (Thn) | Pen- didikan | Lama Usaha |
|-----|-----------------|----------------------|------------|-----------------|------------|
| 1 | Bengkel Mandiri | Spare part | 33 | SLTA | 7 |
| 2 | Usaha Annisa | Rental alat pesta | 50 | S1 | 7 |
| 3 | Usaha Melati | Barang campuran | 38 | S1 | 10 |
| 4 | Batu Putih | Bahan bangunan | 43 | SLTA | 21 |
| 5 | RM. Kania | Rumah makan | 40 | S1 | 6 |
| 6 | CV. Indotama | Alat tulis/kantor | 30 | D1 | 4 |
| 7 | Usaha Mujur | Perbengkelan | 46 | SLTA | 5 |
| 8 | Tk. Sinar 45 | Barang pecah belah | 27 | S1 | 3 |
| 9 | Catering Jayati | Jasa Catering | 55 | SLTA | 4 |
| 10 | Toko Ketin | Barang campuran | 31 | SLTA | 10 |
| 11 | Aliyah Motor | Perbengkelan | 35 | S1 | 3 |
| 12 | Aneka Campuran | Barang pecah belah | 64 | SLTA | 14 |
| 13 | Usaha Kelapa | Pedagang kelapa | 50 | SLTP | 7 |
| 14 | Toko Asia | Alat tulis menulis | 50 | SLTA | 20 |
| 15 | Stand Sukses | Alat rumah tangga | 36 | SLTA | 10 |
| 16 | Tk. Campuran | Padagang eceran | 62 | SLTP | 15 |
| 17 | U.Temmapaduae | Barang campuran | 52 | SLTA | 20 |
| 18 | Nusa Raya | Barang campuran | 66 | SLTA | 10 |
| 19 | Nungky Electon | Rental musik | 38 | SLTA | 5 |
| 20 | Wahyu | Jual & rental CD | 35 | SLTA | 4 |
| 21 | Mubaraq | Konveksi | 49 | SLTA | 6 |
| 22 | Cahaya Disc | Jual & rental CD | 35 | SLTA | 7 |
| 23 | TK.Katangka Ry | Barang campuran | 37 | SLTA | 6 |
| 24 | CV. Arman | Bahan bangunan | 35 | SLTA | 13 |
| 25 | Usaha Adnan | Barang campuran | 38 | S1 | 6 |
| 26 | Kios 53 | Barang campuran | 46 | S1 | 19 |
| 27 | TK. Usaha Jaya | Barang campuran | 32 | SLTA | 10 |
| 28 | UD. Fahmi Jaya | Spare part & bengkel | 43 | D1 | 13 |
| 29 | Usaha Dalle | Pedg Emas | 65 | SLTA | 29 |
| 30 | UD. Laris | Tas dan sepatu | 37 | SLTA | 6 |
| 31 | Pedg Biji Mete' | Pedg hasil pertanian | 58 | SLTA | 15 |
| 32 | Al-Azhar | Barang Campuran | 54 | SLTA | 19 |

Sambungan Lampiran 1

| No. | Nama Usaha | Jenis Usaha | Umur (Thn) | Pen- didikan | Lama Usaha |
|-----|----------------|----------------------|------------|-----------------|---------------|
| 33 | HS. Motor | Spare part & bengkel | 50 | SLTA | 12 |
| 34 | TO. Arini | Penjual obat & jamu | 47 | SLTA | 6 |
| 35 | Andika Jaya | Bengkel las | 50 | SLTA | 11 |
| 36 | Jati Star | Usaha meubel | 44 | SLTP | 20 |
| 37 | TK. Amanah | Barang campuran | 43 | SLTA | 8 |
| 38 | Usaha Miftah | Parkgkalan m.tanah | 34 | S1 | 3 |
| 39 | Toko Fashion | Penjualan pakaian | 35 | SLTP | 3 |
| 40 | Toko Anugrah | Barang campuran | 51 | S1 | 4 |
| 41 | Usaha Manalagi | Home industri dodol | 42 | SLTA | 10 |

Sumber: Analisis Data Primer, 2007

Lampiran 2. Alokasi dan Pemanfaatan Pinjaman Modal Usaha Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Makassar, Tahun 2007

| No. | Jumlah Pinjaman Modal (Rp juta) | Jumlah Dana Dimanfaatkan untuk Usaha | Jumlah Dana Dimanfaatkan Selain Usaha | Tingkat Pemanfaatan Dana (%) | Kriteria |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 20.000.000 | 20.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 2 | 25.000.000 | 25.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 3 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 4 | 25.000.000 | 25.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 5 | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 50 | Kurang skl |
| 6 | 25.000.000 | 25.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 7 | 25.000.000 | 25.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 8 | 15.000.000 | 13.000.000 | 2.000.000 | 86,67 | Kurang |
| 9 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 10 | 20.000.000 | 20.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 11 | 25.000.000 | 25.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 12 | 10.000.000 | 9.000.000 | 1.000.000 | 90 | Sedang |
| 13 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 14 | 25.000.000 | 23.500.000 | 1.500.000 | 94 | Sedang |
| 15 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 16 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 17 | 25.000.000 | 23.000.000 | 2.000.000 | 92 | Sedang |
| 18 | 25.000.000 | 25.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 19 | 15.000.000 | 15.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 20 | 12.500.000 | 12.500.000 | - | 100 | Tinggi |
| 21 | 15.000.000 | 15.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 22 | 15.000.000 | 15.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 23 | 25.000.000 | 25.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 24 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 25 | 25.000.000 | 25.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 26 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 27 | 15.000.000 | 15.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 28 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 29 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 30 | 10.000.000 | 9.500.000 | 500.000 | 95 | Tinggi |
| 31 | 15.000.000 | 13.000.000 | 2.000.000 | 86,66 | Kurang |
| 32 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 100 | Tinggi |

Sambungan Lampiran 2.

| No. | Jumlah Pinjaman Modal (Rp juta) | Jumlah Dana Dimanfaatkan untuk Usaha | Jumlah Dana Dimanfaatkan Selain Usaha | Tingkat Pemanfaatan Dana (%) | Kriteria |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| 33 | 15.000.000 | 15.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 34 | 10.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 60 | Kurang skl |
| 35 | 15.000.000 | 15.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 36 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 37 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 38 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 39 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 100 | Tinggi |
| 40 | 10.000.000 | 7.000.000 | 3.000.000 | 70 | Kurang skl |
| 41 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 100 | Tinggi |

Keterangan:

| | |
|------------------------|-----------------|
| Kategori tinggi | : 95% s/d 100% |
| Kategori sedang | : 90% s/d < 95% |
| Kategori kurang | : 85% s/d < 90% |
| Kategori kurang sekali | : < 85% |

Diagram 3. Frekuensi, Materi, dan Biaya Pendidikan dan Pelatihan yang Dikuti Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Makassar, Tahun 2007

| No. | Frekuensi Pendidikan/Pelatihan | Materi Pendidikan /Pelatihan | Biaya Pendidikan/Pelatihan (Rp) |
|-----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | 2 | A,B,C | 2.000.000 |
| | 3 | A,B,C | 3.000.000 |
| | 1 | A,B | 1.000.000 |
| | 3 | A,B,C | 3.000.000 |
| | 0 | - | 0 |
| | 2 | A,B,C | 2.000.000 |
| | 3 | A,B,C | 3.000.000 |
| 1 | 2 | A,B,C | 2.000.000 |
| 2 | 0 | - | 0 |
| 3 | 2 | A,B,C | 2.000.000 |
| 4 | 3 | A,B,C | 3.000.000 |
| 5 | 0 | - | 0 |
| 6 | 2 | A,B,C | 2.000.000 |
| 7 | 3 | A,B,C | 3.000.000 |
| 8 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 9 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 10 | 3 | A,B,C | 3.000.000 |
| 11 | 3 | A,B,C | 3.000.000 |
| 12 | 0 | - | 0 |
| 13 | 0 | - | 0 |
| 14 | 2 | A,B,C | 2.000.000 |
| 15 | 2 | A,B,C | 2.000.000 |
| 16 | 3 | A,B,C | 3.000.000 |
| 17 | 0 | - | 0 |
| 18 | 3 | A,B,C | 3.000.000 |
| 19 | 2 | A,B,C | 2.000.000 |
| 20 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 21 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 22 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 23 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 24 | 2 | A,B,C | 2.000.000 |
| 25 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 26 | 2 | A,B,C | 2.000.000 |
| 27 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 28 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 29 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 30 | 2 | A,B,C | 2.000.000 |
| 31 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 32 | 1 | A,B | 1.000.000 |

Sambungan Lampiran 3.

| No. | Frekuensi Pendidikan/Pelatihan | Materi Pendidikan /Pelatihan | Biaya Pendidikan/Pelatihan (Rp) |
|-----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 33 | 2 | A,B,C | 2.000.000 |
| 34 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 35 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 36 | 2 | A,B,C | 2.000.000 |
| 37 | 0 | - | 0 |
| 38 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 39 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 40 | 1 | A,B | 1.000.000 |
| 41 | 1 | A,B | 1.000.000 |

Keterangan:

Materi Pendidikan dan Pelatihan

A : Keterampilan manajerial

B : Keterampilan manajemen & keuangan

C : Keterampilan produksi dan pemasaran

Lampiran 4. Proses Pengembalian Pinjaman Modal Usaha dan Kualitas Pinjaman Responden Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Makassar, Tahun 2007

| No. | Frekuensi Pembayaran (bulan) | Frekuensi Tunggakan (bulan) | Kualitas Pinjaman | Proses Pengembalian |
|-----|------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 36 | 0 | Lancar | Tunai |
| 2 | 36 | 0 | Lancar | Tunai |
| 3 | 36 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 4 | 36 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 5 | 20 | 16 | Macet | Transfer bank |
| 6 | 32 | 4 | Kurang lancar | Transfer bank |
| 7 | 24 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 8 | 36 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 9 | 22 | 2 | Kurang lancar | Tunai |
| 10 | 24 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 11 | 21 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 12 | 12 | 6 | Diragukan | Transfer bank |
| 13 | 16 | 2 | Kurang lancar | Transfer bank |
| 14 | 18 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 15 | 14 | 4 | Diragukan | Transfer bank |
| 16 | 8 | 10 | Diragukan | Transfer bank |
| 17 | 22 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 18 | 36 | 0 | Lancar | Tunai |
| 19 | 36 | 0 | Lancar | Tunai |
| 20 | 12 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 21 | 12 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 22 | 36 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 23 | 36 | 0 | Lancar | Tunai |
| 24 | 7 | 29 | Macet | Transfer bank |
| 25 | 24 | 0 | Lancar | Tunai |
| 26 | 14 | 7 | Diragukan | Transfer bank |
| 27 | 16 | 5 | Diragukan | Transfer bank |
| 28 | 10 | 22 | Macet | Transfer bank |
| 29 | 36 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 30 | 9 | 9 | Diragukan | Transfer bank |
| 31 | 17 | 1 | Kurang Lancar | Transfer bank |
| 32 | 12 | 6 | Diragukan | Transfer bank |

Sambungan Lampiran 4.

| No. | Frekuensi Pembayaran (bulan) | Frekuensi Tunggakan (bulan) | Kualitas Pinjaman | Proses Pengembalian |
|-----|------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 33 | 36 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 34 | 5 | 27 | Macet | Transfer bank |
| 35 | 18 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 36 | 18 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 37 | 22 | 1 | Kurang Lancar | Transfer bank |
| 38 | 18 | 0 | Lancar | Transfer bank |
| 39 | 17 | 1 | Kurang lancar | Transfer bank |
| 40 | 10 | 8 | Diragukan | Transfer bank |
| 41 | 11 | 7 | Diragukan | Transfer bank |

Keterangan:

Kategori lancar

: pembayaran angs pokok + bunga tepat waktu

Kategori kurang lancar

: menunggak 1 hari s/d 179 hari

Kategori diragukan

: menunggak 180 hari s/d 360 hari

Kategori macet

: menunggak lewat 360 hari

Lampiran 5. Omset Penjualan Usaha Kecil Mitra Binaan PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Makassar, Tahun 2007

| No. | Omset Penjualan Sebelum Dibina (Rp /bulan) | Omset Penjualan Setelah Dibina (Rp /bulan) | Peningkatan Omset Penjualan (Rp/bulan) |
|-----|--|--|--|
| 1 | 8.000.000 | 13.000.000 | 5.000.000 |
| 2 | 10.000.000 | 17.000.000 | 7.000.000 |
| 3 | 6.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | 15.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 |
| 5 | 5.000.000 | 3.000.000 | - 2.000.000 |
| 6 | 10.000.000 | 17.000.000 | 7.000.000 |
| 7 | 10.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 |
| 8 | 4.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 |
| 9 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 10 | 10.000.000 | 14.000.000 | 4.000.000 |
| 11 | 10.000.000 | 19.000.000 | 9.000.000 |
| 12 | 5.000.000 | 7.000.000 | 2.000.000 |
| 13 | 3.000.000 | 7.000.000 | 4.000.000 |
| 14 | 10.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 |
| 15 | 5.000.000 | 7.000.000 | 2.000.000 |
| 16 | 5.000.000 | 6.000.000 | 1.000.000 |
| 17 | 5.000.000 | 13.000.000 | 8.000.000 |
| 18 | 10.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 |
| 19 | 5.000.000 | 8.000.000 | 3.000.000 |
| 20 | 5.000.000 | 7.000.000 | 2.000.000 |
| 21 | 8.000.000 | 13.000.000 | 7.000.000 |
| 22 | 5.000.000 | 8.000.000 | 3.000.000 |
| 23 | 25.000.000 | 40.000.000 | 15.000.000 |
| 24 | 7.000.000 | 5.000.000 | -2.000.000 |
| 25 | 13.000.000 | 20.000.000 | 7.000.000 |
| 26 | 10.000.000 | 12.000.000 | 2.000.000 |
| 27 | 5.000.000 | 6.000.000 | 1.000.000 |
| 28 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 29 | 5.000.000 | 6.000.000 | 1.000.000 |
| 30 | 5.000.000 | 7.000.000 | 2.000.000 |
| 31 | 10.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 |
| 32 | 5.000.000 | 7.000.000 | 2.000.000 |

Sambungan Lampiran 5.

| No. | Omset Penjualan Sebelum Dibina (Rp /bulan) | Omset Penjualan Setelah Dibina (Rp /bulan) | Peningkatan Omset Penjualan (Rp/bulan) |
|-----|--|--|--|
| 33 | 8.000.000 | 13.000.000 | 5.000.000 |
| 34 | 10.000.000 | 12.000.000 | 2.000.000 |
| 35 | 8.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 |
| 36 | 7.000.000 | 10.000.000 | 3.000.000 |
| 37 | 5.000.000 | 7.000.000 | 2.000.000 |
| 38 | 10.000.000 | 13.000.000 | 3.000.000 |
| 39 | 10.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 |
| 40 | 5.000.000 | 7.000.000 | 2.000.000 |
| 41 | 3.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 |

| | Y | X1 | X2 |
|----|------|------|-----|
| 1 | 5.0 | 20.0 | 2.0 |
| 2 | 7.0 | 25.0 | 3.0 |
| 3 | 2.0 | 10.0 | 1.0 |
| 4 | 5.0 | 25.0 | 3.0 |
| 5 | -2.0 | 20.0 | .0 |
| 6 | 7.0 | 25.0 | 2.0 |
| 7 | 10.0 | 25.0 | 3.0 |
| 8 | 5.0 | 15.0 | 2.0 |
| 9 | .0 | 10.0 | .0 |
| 10 | 4.0 | 20.0 | 2.0 |
| 11 | 9.0 | 25.0 | 3.0 |
| 12 | 2.0 | 10.0 | .0 |
| 13 | 4.0 | 10.0 | 2.0 |
| 14 | 10.0 | 25.0 | 3.0 |
| 15 | 2.0 | 10.0 | 1.0 |
| 16 | 1.0 | 5.0 | 1.0 |
| 17 | 8.0 | 25.0 | 3.0 |
| 18 | 10.0 | 25.0 | 3.0 |
| 19 | 3.0 | 15.0 | .0 |
| 20 | 2.0 | 12.5 | .0 |
| 21 | 5.0 | 15.0 | 2.0 |
| 22 | 3.0 | 15.0 | 2.0 |
| 23 | 15.0 | 25.0 | 3.0 |
| 24 | -2.0 | 10.0 | .0 |
| 25 | 7.0 | 25.0 | 3.0 |
| 26 | 2.0 | 10.0 | 2.0 |
| 27 | 1.0 | 15.0 | 1.0 |
| 28 | .0 | 10.0 | 1.0 |
| 29 | 1.0 | 5.0 | 1.0 |
| 30 | 2.0 | 10.0 | 1.0 |
| 31 | 5.0 | 15.0 | 2.0 |
| 32 | 2.0 | 5.0 | 1.0 |
| 33 | 5.0 | 15.0 | 2.0 |
| 34 | 2.0 | 10.0 | 1.0 |
| 35 | 2.0 | 15.0 | 1.0 |
| 36 | 3.0 | 10.0 | 2.0 |
| 37 | 2.0 | 10.0 | .0 |
| 38 | 3.0 | 10.0 | 1.0 |

| | Y | X1 | X2 |
|----|-----|------|-----|
| 39 | 5.0 | 10.0 | 1.0 |
| 40 | 2.0 | 10.0 | 1.0 |
| 41 | 1.0 | 5.0 | 1.0 |

Regression

Variables Entered/Removed^b

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|-------|---|-------------------|--------|
| 1 | BIAYA PELATIHAN, PINJAMAN MODAL USAHA ^a | - | Enter |

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PERKEMBANGAN USAHA

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .858 ^a | .736 | .722 | 1.8470 |

a. Predictors: (Constant), BIAYA PELATIHAN, PINJAMAN MODAL USAHA

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 361.970 | 2 | 180.985 | 53.050 | .000 ^a |
| | Residual | 129.640 | 38 | 3.412 | | |
| | Total | 491.610 | 40 | | | |

a. Predictors: (Constant), BIAYA PELATIHAN, PINJAMAN MODAL USAHA

b. Dependent Variable: PERKEMBANGAN USAHA

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -1.723 | .704 | | -2.448 | .019 |
| | PINJAMAN MODAL USAHA | .171 | .063 | .333 | 2.736 | .009 |
| | BIAYA PELATIHAN | 1.997 | .415 | .585 | 4.811 | .000 |

a. Dependent Variable: PERKEMBANGAN USAHA